# Analisis Fenomenologi Edmund Husserl Terhadap Komodifikasi Agama di Ruang Publik; Studi Kasus Penggunaan Simbol-Simbol Islam Pada Pilkada Sumenep 2020

# Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam



Oleh:

Khalilurrahman

NIM: E91217082

# PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Khalilurrahman

NIM : E91217082

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Januari 2022. Yang tertanda,

ii

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Analisis Fenomenogi Edmund Husserl Terhadap Komodifikasi Agama di Ruang Publik; Studi Kasus Penggunaan Simbol-Simbol Islam Pada Pilkada Sumenep 2020" yang ditulis oleh Khalilurrahman (E91217082) telah disetujui pada tanggal 10 Januari 2022.

Surabaya, 10 Januari 2022.

Pembimbing,

Dr. Kasno, M.Ag

NIP. 195912011986031006

# PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Analisis Fenomenologi Edmund Husserl Terhadap Komodifikasi Agama di Ruang Publik; Studi Kasus Penggunaan Simbol-Simbol Islam Pada Pilkada Sumenep 2020" yang ditulis oleh Khalilurrahman ini telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 12 Januari 2022.

# Tim Penguji:

- 1. Dr. Kasno, M.Ag
- 2. Dr. Suhermanto, M. Hum
- 3. Dr. Tasmuji, M.Ag
- 4. Muchammad Helmi Umam, M. Hum

(Penonii I)

(Penguji III) ...

Surabaya, 15 Januari 2022.

19640918199203100

Dekan

# **KEMENTERIAN AGAMA**



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:Khalilurrahman
NIM	:E91217082
Fakultas/Jurusan:	Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address	:lylurdayner123@gmail.com
Perpustakaan UIN karya ilmiah :	ngan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada I Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas □Tesis □ Desertasi □ Lain-lain )
Komodifikasi	Fenomenologi Edmund Husserl Terhadap Agama di Ruang Publik; Studi Kasus Simbol-Simbol Islam Pada Pilkada Sumenep

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2022 (Khall Jurkahman)

#### **ABSTRAK**

Dalam naskah skripsi yang berjudul "Analisis Fenomenologi Edmund Husserl Terhadap Komodifikasi Agama di Ruang Publik; Studi Kasus Penggunaan Simbol-Simbol Islam Pada Pilkada Sumenep 2020", penulis akan memfokuskan penelitian ini pada kasus Pilkada Sumenep tahun 2020 lalu yang dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan simbol-simbol Islam serta santernya wacana-wacana keislaman yang digunakan oleh tokoh-tokoh agama, elite-elite politik, dan simpatisan para calon sebagai alat legitimasi untuk melanggengkan ambisi politik pada Pilkada Sumenep 2020 lalu. Mereka menggunakan Islam sebagai salah satu faktor penting untuk memobilisasi masyarakat Sumenep, karena secara historis masyarakat Sumenep dalam hal kepatuhan beragama masih dianggap cukup kental, ini menjadi peluang tersendiri bagi kelompok yang bersangkutan untuk menggandeng pihak-pihak tertententu yang dianggap punya pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan masalah di atas maka timbul sebuah pertanyaan bagaimana komodifikasi agama di ruang publik pada Pilkada Sumenep 2020? lalu bagaimana analisis fenomenologi Edmund Husserl terhadap Pilkada Sumenep 2020? Maka dari itu penulis melakukan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan fenomenologi Edmund Husserl yang bertujuan untuk mengetahui fenomena esensial serta mengungkap pengalaman seseorang. Studi kasus yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alamiah untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara luas dan mendalam dengan sumber primer dan sumber sekunder.

Kata Kunci: Analisis Fenomenologi, Komodifikasi Agama, Simbolisasi Islam.

# **DAFTAR ISI**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	•••••
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan B <mark>ata</mark> san Masalah	4
C. Rumusan Masala <mark>h</mark>	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kerangka Teoritis	6
G. Kajian Terdahulu	6
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN FENOMENOLOGI DAN KOMODIFIKASI F	OLITIK 13
A. Kajian Fenomenologi: Umum dan Husserl	13
Asal Usul Teori Fenomenologi	13
2. Fenomenologi Menurut Edmund Husserl	15
3. Pendekatan Fenomenologi Edmund Husserl	19

4. Tahapan-Tahapan Fenomenologi Edmund Husserl	23	
B. Kajian Politik: Komodifikasi Agama Dalam Politik	25	
1. Pengertian Komodifikasi Agama	25	
2. Nilai-Nilai Agama		
3. Tipe-Tipe Komodifikasi Agama		
4. Pengertian Islam dan Politik		
5. Relasi Antara Islam dan Politik	31	
6. Penggunaan Simbolisasi Islam di Ruang Publik	34	
BAB III GAMBARAN UMUM PILKADA SUMENEP TAHU	JN 202036	
A. Deskripsi Lokasi Pe <mark>ne</mark> lit <mark>ian</mark>		
1. Profil Sumenep	36	
2. Letak Geografis Sumenep	37	
3. Agama dan Partai Politik di Sumenep	39	
4. Profil Pasangan Calon Bupati Sumenep 2020	40	
B. Deskripsi Subyek Penelitian	43	
1. Hasil Wawancara Mengenai Latar Belakang Terjadin	ya Komodifikasi	
Agama Pada Pilkada Sumenep 2020	45	
2. Hasil Wawancara Mengenai Bagaimana Komodifika	asi Agama Yang	
Terjadi Pada Pilkada Sumenep	47	
BAB IV KOMODIFIKASI AGAMA PADA PILKADA SUMI	ENEP 2020 50	
A. Bentuk Komodifikasi Agama Pada Pilkada Sumen	ep 2020 Dalam	
Tafsir Fenomenologi Edmund Husserl	50	
1 Predikat	53	

2. Slogan	53
3. Simbol	54
B. Latar Belakang Komodifikasi Agama Pada Pilkada	Sumenep 2020
Dalam Tafsir Fenomenogi Edmund Husserl	56
Kultur dan Budaya Masyarakat Sumenep	56
2. Signifikansi Peran Agama Terhadap Masyarakat Sumer	nep 57
3. Minimnya Kreatifitas Elite dan Simpatisan	58
4. Sikap Apatis Masyarakat Sumenep	58
C. Komodifikasi Agama Pada Pilkada Sumenep 2020 D	alam Perspektif
Fenomenologi Edm <mark>und Hus</mark> serl	61
1. Manusia, Simbol <mark>da</mark> n Keb <mark>ud</mark> ay <mark>aan</mark>	62
2. Nilai-nilai Agam <mark>a:</mark> Ind <mark>ividua</mark> l <mark>dan</mark> Kole <mark>kti</mark> f	63
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PIISTAKA	66

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah menjadi momen penting pertarungan partai politik untuk membuktikan diri sebagai partai yang mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas. Pada tahun 2020 yang lalu perhelatan pemilihan Pilkada dilakukan secara serentak di beberapa daerah setingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia, salah satunya yaitu di Sumenep. Partai politik melalui calon bupati/wali kota dan wakilnya menjadi pertarungan harga diri sehingga segala upaya dalam bentuk apapun dilakukan dalam rangka untuk mencapai satu tujuan, yakni menjadi pemenang dalam kompetisi yang selalu berjalan alot dan penuh drama serta tidak jarang berakhir ricuh akibat ketidak puasan dan kekecewaan bagi setiap pihak yang merasa gagal dalam perebutan kekuasaan.

Partai politik sebagai pengusung para calon seyogianya memiliki peran sentral dalam mewujudkan Pilkada yang jujur, adil dan aman. Beragam cara dilakukan dalam rangka menjadi pemenang mulai dari cara konvensional seperti kampanye, penyebaran visi-misi di sepanjang jalan, publikasi calon di media massa hingga cara-cara yang irasional dengan melibatkan dukun atau paranormal, bahkan menyeret agama sebagai tunggangan dalam melancarkan ambisi politiknya. Padahal politik itu sendiri adalah aktivitas yang sangat rasional. Salah satu cara yang belakangan ini digunakan oleh partai politik atau calon bupati/wali kota dan wakilnya untuk meraih simpati masyarakat adalah penggunaan simbol-simbol agama dalam kampanye. Berbagai atribut agama diperkenalkan dan

dikonstruksikan sebagai bagian dari diri dan program kerja calon kandidat yang bersangkutan. Penggunaan simbol-simbol agama khususnya Islam menjadi titik awal bagaimana kuatnya upaya elite partai menggunakan instrumen agama (Islam) sebagai alat politik yang paling tepat untuk menggugah umat Islam.<sup>1</sup>

Umat Islam menjadi sasaran utama mengingat secara sosiologis dan politik sangat kuat. Di Sumenep misalnya umat Islam begitu sangat dominan sehingga partai politik (bukan hanya partai politik Islam) berebut dengan pemilih yang sama. Apalagi, mayoritas pemilih (Islam) tergolong pemilih konvensional dan loyal (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) yang sangat fanatik dalam beragama. Selain mayoritas pemilih adalah umat Islam, para calon yang diusung partai politik juga berasal dari kalangan muslim.

Simbol adalah ciri khas agama, karena simbol lahir dari sebuah kepercayaan, dari berbagai ritual dan etika agama. Simbol dimaknai sebagai sebuah tanda yang dikultuskan dalam berbagai bentuknya sesuai dengan kultur dan kepercayaan masing-masing agama. Kultus ini kemudian melahirkan sebuah sistem dan struktur simbol yang membentuk manusia menjadi *homo simbolicius* dalam tipe atau pola religiusnya. Dalam agama, simbol selalu hadir menjadi bagian yang sangat penting bagi para pemeluknya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Geertz mendefinisikan agama sebagai sistem simbol. Lebih jauh, Geertz menekankan bahwa simbol tersebut menciptakan kondisi emosi yang kuat, menyebar, dan bertahan lama. Meskipun simbol memiliki kedudukan penting dalam agama dan bagi pemeluknya, tidak semua simbol selalu dapat

<sup>1</sup>Zuly Qodir, *Gerakan Islam Non Mainstream dan Kebangkitan Islam Politik di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 327.

diperlihatkan di ruang publik. Ruang publik di sini diartikan sebagai *the areas of public engagement which fall to be conducted or regulated by the state.*<sup>2</sup> Sejarah manusia telah menunjukkan tentang bagaimana simbol agama telah dipergunakan untuk memperkeruh konflik antar pemeluk agama.

Kedudukan simbol agama yang secara signifikan membawanya pada persoalan komodifikasi agama. Simbol-simbol agama dikomersialisasikan di ruang publik demi memperoleh keuntungan. Komodifikasi agama saat ini telah menyebar ke masyarakat luas di banyak Negara. Di masyarakat Islam Indonesia secara umum dan masyarakat Islam Sumenep secara khusus, komodifikasi agama semakin tampak jelas, di mana Islam ditransformasi menjadi komoditi simbolis. Lebih jauh, interaksi antara Islam dan demokrasi menyebabkan simbol Islam menjadi penting dalam dinamika politik lokal. Karena simbol-simbol agama mampu melegitimasi kekuatan elite politik sebagai bentuk dari perlawanan terhadap oposisi termasuk militan Islam. Mobilisasi simbol agama memberikan pengaruh besar pada arena perpolitikan lokal di Sumenep. Para elite yang memiliki latar belakang santri mampu memberikan efek nyata yakni negosiasi ulang batas-batas kekuatan politik, pengaturan ekonomi, serta identitas diri. Tentu saja hubungan dengan para tokoh-tokoh agama dan pesantren juga menjadi modal besar dalam menarik simpati masyarakat muslim secara khusus.

2**1**.

<sup>2</sup>Malcolom Evans, *Manual on the Wearing of Religious Symbols in Public Area*, (France Publising: Council of Europe, 2009), 76.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Hasse J. "Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 2 (2016), 179-186.

Para calon bupati menggiring masyarakat dengan menggunakan framing yang dikhususkan pada penonjolan simbol-simbol agama, sehingga sebagai paradigma konstruksionis, framing telah terbukti mampu menghasilkan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pola media massa. Maka pembingkaian terhadap realitas peristiwa yang dimaknai dan dikonstruksi dengan cara tertentu dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat, dan tidak heran jika calon bupati Sumenep dan tim pemenangannya kerap kali menggunakan isu agama sebagai salah satu media untuk mendulang suara masyarakat.

Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan pemilihan bupati (Pilbup) Sumenep begitu sangat kental dengan muatan polarisasi simbol-simbol agama, secara khusus Islam. Tiap pasangan calon seolah-olah didesain menjadi tokoh yang sangat agamis, religius bahkan paling Nahdliyin. Kesan yang ditonjolkan bahwa mereka berangkat dari kalangan ulama, dekat dengan para kiai, dilahirkan dari rahim pesantren, keturunan tokoh agama. Sehingga predikat yang seringkali disematkan adalah Gus, Lora dan Kiai muda. Semakin banyak dukungan dari para ulama menjadi kekuatan tersendiri untuk meyakinkan masyarakat bahwa ia adalah figur yang layak untuk memimpin Sumenep.

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan adanya latar belakang di atas, dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian ini. Oleh sebab itu butuh adanya identifikasi dan batasan-batasan masalah sebagai acuan dari penelitian skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

<sup>4</sup>Abd Aziz, "Dua Tokoh Pesantren Bertarung Berebut Dukungan Massa di Pilkada Sumenep", dalam https://m.antaranews.com/berita/1698726/31/08 2020. Diakses 15/10/2021.

- Memahami fenomenologi sebagai model analisis yang digunakan untuk mengungkap suatu peristiwa dinamika politik Sumenep pada tahun 2020 lalu.
- Pentingnya memahami relasi Islam dan politik yang terjadi di Kabupaten Sumenep.
- 3. Menjamurnya komodifikasi dan polarisasi agama pada Sumenep 2020.
- 4. Perlunya menganalisis fenomena politik di Sumenep sebagai upaya menggambarkan sebuah politisasi agama (Islam) di tengah-tengah masyarakat Sumenep.

#### C. Rumusan Masalah

- Bagaimana Komodifikasi Agama Yang Terjadi di Ruang Publik Pada Pilkada Sumenep Tahun 2020?
- Bagaimana Analisis Fenomenologi Edmund Husserl terhadap Komodifikasi
   Agama Pada Pilkada Sumenep Tahun 2020?

# D. Tujuan Penelitian

- Untuk Mengetahui Macam-Macam Komodifikasi Agama Yang Digunakan Pada Pilkada Sumenep Tahun 2020.
- Untuk Mengetahui Analisis Fenomenologi Edmund Husserl Terhadap
   Komodifikasi Agama Pada Pilkada Sumenep Tahun 2020.

#### E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan hasilnya bisa memberikan manfaat dan sumbangsih baik secara teoritis maupun dalam proses aplikasinya, manfaat secara teoritis bisa menjadi bahan kajian serta rujukan dalam merperkaya khazanah intelektual dalam bidang keilmuan baik Filsafat, Politik maupun Agama.

Sedangkan dalam pengaplikasiannya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bekal bagi masyarakat Sumenep secara khusus dan masyarakat luas secara umum untuk tetap senantiasa tidak terpengaruh dengan isu-isu agama yang seringkali disangkut pautkan dengan politik.

#### F. Kerangka Teoritis

Dalam rangka untuk mencari solusi dari permasalahan dalam penelitian ini, maka diperlukan sebuah teori sebagai tindakan untuk memecahkan permasalahan secara mendalam.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Fenomenologi Edmund Husserl, yaitu dimaksudkan sebagai teori dasar atas penampakan untuk mengkaji suatu peristiwa secara empiris, di mana perspektif fenomenologi Edmund Husserl di sini bersifat subjektif, yakni berdasarkan penuturan para subjek yang mengalami fakta atau fenomena yang bersangkutan tentang penampakan suatu objek dan kondisi yang dialami masyarakat.

#### G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu berikut ini sebagai bahan autokritik terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan maupun kekurangannya. Gambaran umum tentang analisis framing Robert N. Entman ini dapat didalami dari berbagai kajian ilmiah sebagaimana yang diulas oleh para peneliti dan akademisi sebelumnya.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Mujibur Rahman yang berjudul Visualisasi Agama di Ruang Publik, di mana dalam kajian ini menjelaskan bahwa komodifikasi agama membawa wajah baru agama ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya, tepatnya sebelum teknologi berkembang seperti saat ini, dan juga menjadi tugas para pemeluk agama untuk memahami agama sebagai penuntun jalan hidup bukan mendistorsinya menjadikan hal-hal yang bersifat pragmatis.<sup>5</sup>

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Abdul Malik & Ariyandi Batubara yang berjudul "Komodifikasi Agama dalam Ruang Politik di Seberang Kota Jambi" yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana memasukkan agama ke dalam dinamika aktivitas politik di daerah seberang kota Jambi demi semata-mata untuk kepentingan kekuasaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh para elite politik, proses rekrutmen politik dan mentalitas pragmatis dari sebagian oknum politisi di seberang kota Jambi.<sup>6</sup>

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Abdur Razaki yang berjudul "Komodifikasi Islam (Kesalehan dan Pergulatan Identitas di Ruang Publik)", yang mana kajian ini membahas tentang Islam dan modernitas dalam konteks globalisasi tidak selamanya melahirkan konfrontasi secara mendasar untuk saling meniadakan, sebaliknya menyisakan ruang lebar untuk saling berbagi secara kreatif dalam spektrum yang dinamis, saling mempengaruhi, saling beradaptasi dan saling memanfaatkan.<sup>7</sup>

Keempat, jurnal yang ditulis oleh L. Rudy Rustandi yang berjudul "Disrupsi Nilai Keagamaan dan Komodifikasi Agama di Era Digital". Yang di

<sup>5</sup>Mujibur Rahman, "Visualisasi Agama di Ruang Publik; Komodifikasi, Reproduksi Simbol dan Maknanya", *Jurnal Humanistika*, Vol. 4, No. 1, (2018), 104.

<sup>6</sup>Abdul Malik & Ariyandi Batubara, "Komodifikasi Agama dalam Ruang Politik di Seberang Kota Jambi", *Jurnal kontekstualita*, Vol. 29, No. 2, (2014), 110.

<sup>7</sup>Abdur Razaki, "Komodifikasi Islam (Kesalehan dan Pergulatan Identitas di Ruang Publik)", *Jurnal Dakwah*, Vol. 14, No. 2, (2013), 210.

dalamnya membahas tentang aktifitas dakwah virtual keagamaan yang memiliki tendensi demensi politik sangat kuat. Fenomena ini merepresentasikan kondisi masyarakat saat ini yang mengalami krisis ideologi dalam beragama. Konflik secara terbuka merupakan keniscayaan dalam era digital saat ini. Agama tidak lagi dirawat dalam area yang "aman".

#### H. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini yang dapat penulis gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas adalah sebagai berikut:

#### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan suatu latar belakang objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam, kerena penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) studi kasus yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alamiah untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara luas dan mendalam tentang framing Robert N. Entman terhadap Komodifikasi Agama di Ruang Publik yang kemudian akan disajikan dengan cara deskriptif (analisis deskriptif).

# b. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, elite partai politik serta masyarakat Sumenep yang terlibat langsung terhadap dinamika prosesi Pilkada Sumenep 2020. Namun peneliti memfokuskan kepada tokoh agama, politisi, serta tokoh masyarakat Sumenep yang dianggap obyektif

serta benar-benar memahami secara komprehensif terhadap prosesi Pilkada Sumenep yang berlangsung pada tahun 2020 lalu.

#### c. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, ada dua sumber yang akan digunakan, yaitu sumber data primer yang diperoleh dari informan langsung (masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh politisi di Sumenep), dan sumber data skunder yaitu berupa arsip, dokumen lain dan hasil unduhan internet, buku- buku, jurnal dan literatur yang mendukung data primer.

Di samping itu, agar memperoleh data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan kategori penting dalam suatu penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan cara tatap muka maupun dengan menggunakan sosial media. Pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk dapat dikonstruksikan sebuah makna dalam topik tertentu.<sup>8</sup>

# 2. Observasi

Sutrisno hadi mengemukakan bahwa observasi ialah proses yang sangat kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan

<sup>8</sup>Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 230.

psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.<sup>9</sup> Dengan observasi di lapangan ini, peneliti mampu memahami konteks data dalam keseluruhan atas fenomena yang terjadi di lapangan, yang mana peneliti juga dapat memperoleh pandangan yang holistik dan menyeluruh.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi partisipatif yang ikut berperan dan turun langsung dalam mengamati respon masyarakat terhadap prosesi Pilkada Sumenep 2020 lalu. Tahapan yang akan penulis gunakan dalam observasi penelitian ini ialah dengan menggunakan tahapan deskripsi, tahap deduktif, dan tahap seleksi untuk mencapai karakteristik, perbedaan, kesamaan dan menemukan suatu pemahaman yang dalam.<sup>10</sup>

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah penelitian, untuk penangkap dan penguat data yang mencakup suatu peristiwa yang telah berlalu. Beberapa bentuk dokumentasi diantaranya adalah tulisan, gambar, video, rekaman atau karya-karya monumental.<sup>11</sup> Hal ini untuk mendukung hasil penelitian dari wawancara dan observasi agar lebih kredibel.

#### d. Pendekatan dan Analisis Data

Pendekatan yang akan digunakan pada Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan fenomenologi Edmund Husserl, yang bertujuan untuk mengetahui fenomena esensial dan mengungkapkan pengalaman seseorang terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan.

 $^{10}$ *Ibid.* 230.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>*Ibid*, 90.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Sugiono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2016), 63.

Analisis data merupakan upaya peneliti untuk mencari dan menata secara sistematis catatan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, studi dokumen dan sebagainya setelah data terkumpul.

Adapun data yang dianalisis adalah transkip wawancara dan pengamatan lapangan, dengan tahapan:

- Deduksi, yaitu mengemukakan teori-teori yang bersifat umum, pendapatpendapat, ide-ide untuk dijadikan pisau analisa terhadap data yang dikumpulkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari suatu peristiwa.
- 2. Induksi yaitu menarik data di lapangan kepada teori-teori atau aturan-atuaran yang digunakan oleh penulis.
- 3. Verifikasi, yaitu mencocokkan data yang diperoleh dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

#### I. Sistematika Pembahasan

Bab *Pertama*, menjelaskan tentang Latar belakang, rumusan masalah, Tujuan Penulisan, Kajian Terdahulu, Metode penelitian dan sistematika pembahasan.

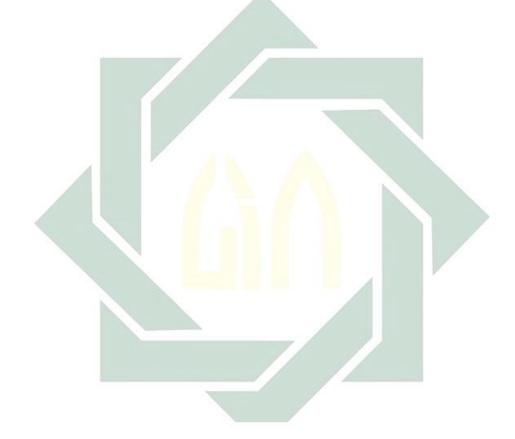
Bab *kedua*, menjelaskan tentang pengertian analisis fenomenologi Edmund Husserl, komodifikasi agama serta relasi agama dan politik.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang gambaran umum Pilkada Sumenep 2020, letak geografis penelitian, temuan penelitian dan deskripsi subyek penelitian.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offsed, 1994), 42.

Bab *keempat*, menjelaskan tentang komodifikasi agama di ruang publik pada Pilkada Sumenep 2020, latar belakang komodifikasi agama pada Pilkada Sumenep 2020, dan komodifikasi agama pada Pilkada Sumenep 2020 dalam perspektif fenomenologi Edmund Husserl.

Bab kelima, Penutup berisi tentang kesimpulan, dan saran.



#### **BAB II**

#### KAJIAN FENOMENOLOGI DAN KOMODIFIKASI POLITIK

## A. Kajian Fenomenologi: Umum dan Husserl

# 1. Asal Usul Teori Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari kata Yunani, *phainomenon* yang merujuk pada arti "yang menampak". Fenomena adalah fakta yang disadari dan masuk ke dalam pemahaman manusia. Sehingga, suatu objek ada dalam relasi kesadaran. Dewasa ini, fenomenologi dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode berpikir yang mempelajari fenomena manusiawi (*human phenomena*) tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena tersebut serta realitas objektif dan penampakannya. Fenomenologi sebagai salah satu cabang filsafat pertama kali dikembangkan di universitas-universitas Jerman sebelum Perang Dunia I, khususnya oleh Edmund Husserl, yang kemudian dilanjutkan oleh Martin Heidegger dan yang lainnya, seperti Jean Paul Sartre. Selanjutnya Sartre memasukkan ide-ide dasar fenomenologi dalam pandangan eksistensialisme. Adapun yang menjadi fokus eksistensialisme adalah eksplorasi kehidupan dunia mahluk sadar atau jalan kehidupan subjek-subjek sadar.<sup>1</sup>

Menurut Hegel, fenomena yang kita alami dan tampak pada kita merupakan hasil kegiatan yang bermacam-macam dan runtutan konsep kesadaran manusia serta bersifat relatif terhadap budaya dan sejarah. Husserl menolak pandangan Hegel mengenai relativisme fenomena budaya dan sejarah, namun dia

<sup>1</sup>Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi:Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 34-45

menerima konsep formal fenomenologi Hegel serta menjadikannya prinsip dasar untuk perkembangan semua tipe fenomenologi.<sup>2</sup>

Fenomenologi merupakan filosofi dan sekaligus suatu pendekatan metodologi dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Hakekatnya, fenomenologi berkenaan dengan pemahaman tentang bagaimana keseharian, dunia intersubyektif (dunia kehidupan) atau juga disebut *lebenswelt*. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani dengan asal suku kata *phanamenon* yang berarti fenomena atau sesuatu yang tampak dan terlihat. Dalam bahasa Indonesia, biasa dipakai istilah gejala. Istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Heinrick Lambert, sedangkan tokoh pelopor fenomenologi adalah Edmund Husserl (1859-1938).<sup>3</sup>

Metodologi kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi merupakan riset terhadap dunia kehidupan orang-orang, pengalaman subjektif mereka terhadap kehidupan pribadi sehari-hari. Periset secara konsisten akan melakukan bracketing atau mengurung asumsi-asumsi pribadi peneliti sehingga peneliti mampu melihat fenomena dari sudut pandang responden. Fenomenologi berusaha mendekati objek kajian secara konstrukvis serta pengamatan yang cermat, dengan tidak menyertakan prasangka oleh konsepsi-konsepsi manapun sebelumnya.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>*Ibid*, 62.

<sup>4</sup>Ibid, 89.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Moustakas Clark, *Phenomenological Research Methods*, (California: Sage, 1987), 87.

## 2. Fenomenologi Menurut Edmund Husserl

Fenomenologi adalah aliran filsafat yang dikembangkan oleh seorang filosof berkebangsaan Jerman, Edmund Husserl. Istilah fenomenologi secara etimologi berasal dari kata *fenomena* dan *logos. Fenomena* berasal dari kata kerja Yunani "*phainesthail*" yang berarti menampak, dan terbentuk dari akar kata fantasi, *fantom*, dan *fosfor* yang artinya sinar atau cahaya. Dari kata itu terbentuk kata kerja, tampak, terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa Indonesia berarti cahaya. Secara harfiah fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan.<sup>5</sup>

Fenomenologi berarti uraian atau pembahasan tentang fenomena atau sesuatu yang sedang menampakkan diri, atau sesuatu yang sedang menggejala. Fenomenologi hakekatnya ingin mencapai pengertian yang benar, yaitu pengertian yang menangkap realitas seperti dikehendaki oleh realitas itu sendiri. Menurut feomenologi Edmund Hsserl, realitas dapat ditangkap oleh pengertian manusia. Pengertian adalah tempat bertemu dan bersatunya manusia dengan realitas. Dalam pertemuan itu realitas menampakkan diri, menggejala, akan tetapi ia juga menyembunyikan diri. Pengertian manusia tentang susuatu hal bisa bertambah, menjadi lebih sempurna. Bertambah dan sempurnanya pengertian itu karena manusia selalu menyelidiki, bertanya, dan terus bertanya. Bertanya adalah kegiatan manusia untuk menghilangkan kabur yang menyelimuti realitas. Realitas

<sup>5</sup>Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), 64.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>N. Drijarkara, *Percikan Filsafat*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1989), 116-117.

menampakkan diri, akan tetapi bersama itu juga ia bertabir. Manusia berusaha menghilangkan atau menyingkap tabir itu untuk dapat melihat realitas.<sup>7</sup>

Kabut yang menyelimuti realitas bukan semata-mata dari pihak realitas saja, melainkan juga dari pihak yang melihat realitas. Konsepsi-konsepsi manusia, cara berfikir, suasana hidup dan latar belakangnya sering menjadi kabut tebal dalam melihat realitas. Konsepsi-konsepsi, cara berfikir, suasana hidup dan latar belakang yang menjadi kabut orang melihat realitas itu ternyata tidak hanya dari dirinya sendiri, tetapi kadang ditanam, dimasukkan ke dalam sanubari oleh zaman yang dialami. Husserl menyarankan agar manusia sampai kepada realitas maka harus melepaskan diri dari berbagai kegelapan itu dan menerobos kabut. Istilah Husserl, "Nach den Sachen Selbst" yang artinya kita harus menerobos kabut sampai ke realitas yang sesungguhnya.8

Fenomenologi Husserl pada prinsipnya bercorak idealistik, karena menyerukan untuk kembali kepada sumber asli pada diri subjek dan kesadaran. Ilmu komunikasi (komunikologi) akan mendapatkan landasan yang kokoh jika asumsi-asumsi ontologi dan epistemologinya didasarkan pada pengetahuan tentang esensi kesadaran. Konsepsi Husserl tentang "aku transedental" dipaharni sebagai subjek absolut, yang seluruh aktivitasnya adalah menciptakan dunia. Namun Husserl tidak menjelaskan bahwa dalam kehidupan yang sesungguhnya, subjek atau kesadaran itu selain mengkonstitusikan dunia, juga dikonstruksikan oleh dunia.

<sup>7</sup>Mary Warnock, *Existensialism*, (New York & Oxford: Oxford University Press, 1989), 26.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>N. Drijarkara, *Percikan Filsafat*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1989), 116-117.

Adapun pokok-pokok pikinan Husserl mengenai fenomenologi, adalah sebagai berikut:

- a). Fenomena adalah realitas sendiri yang tampak
- b). Tidak ada batas antara subjek dengan realitas
- c). Kesadaran bersifat intensional
- d). Terdapat interaksi antara tindakan kesadaran (noesis) dengan objek yang disadari (noema).

Proses interpretasi merupakan hal yang sangat penting dan sentral dalam fenomenologi. Interpretasi adalah proses aktif pemberian makna dari suatu pengalaman.<sup>9</sup> Menurut tradisi fenomenologi, interpretasi merupakan realitas bagi seorang indvidu. Dengan demikian proses interpretasi akan terus berkembang dan berubah-ubah sepanjang manusia itu hidup antara pengalaman dengan makna yang diberikan setiap kali menemui pengalaman baru. Dalam tradisi fenomenologi ini terbagi lagi ke dalam tiga bagian<sup>10</sup> yaitu:

- a). fenomenologi klasik.
- b). fenomenologi persepsi.
- c). fenomenologi hermenetik.

Tokoh penting dalam teori fenomenologi persepsi adalah Maurice Merleau-Ponty yang pandangannya dianggap mewakili gagasan mengenai fenomenologi persepsi (phenomenology of perception) yang dinilai sebagai penolakan terhadap pandangan objektif namun sempit dari Husserl.<sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, (Yogyakarta: Gramedia, 2001), 40.

 $<sup>^{10}</sup>Ibid.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>*Ibid*, 42.

Menurut Maurice Merleau Ponty, seorang tokoh teori ini menyatakan bahwa manusia ialah makhluk yang memiliki kesatuan fisik dan mental yang menciptakan makna terhadap dunianya. Kita mengetahui sesuatu hanya melalui hubungan pribadi kita dengan sesuatu itu. Sebagai manusia kita dipengaruhi oleh dunia luar atau lingkungan kita, namun sebaliknya kita juga mempengaruhi dunia di sekitar kita melalui bagaimana kita mengalami dunia. Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. 13

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubunganhubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan
pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory
stimuli).<sup>14</sup> Persepsi kita bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh berbagai
faktor, personal, situasional, fungsional dan struktural. Di antara faktor yang besar
pengaruhnya dalam mempersepsikan sesuatu adalah perhatian, konsep fungsional
dan konsep struktural.<sup>15</sup> Fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia
untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Fenomenologi menjadikan
pengalaman sebenarnya sebagai data utama dalam memahami realitas. Apa yang
dapat diketahui seseorang adalah apa yang dialaminya. Orang mengetahui
pengalaman atau peristiwa dengan cara mengujinya secara sadar melalui perasaan
dan persepsi yang dimiliki seseorang yang bersangkutan.<sup>16</sup>

2<sub>1</sub>

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, (Yogyakarta: Gramedia, 2001) 42.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Achmad Mubarok, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 109.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 51.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Achmad Mubarok, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 109.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, (Yogyakarta: Gramedia, 2001), 39.

Asumsi fenomenologi adalah pokok manusia secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dengan memberikan makna atas sesuatu yang dialaminya. Oleh karena itu, interpretasi merupakan proses aktif yang memberikan makna atas sesuatu tindakan kreatif yakni tindakan menuju pemaknaan. Fenomenologi yang diformulasikan oleh Husserl pada permulaan abad ke-20 menekankan dunia yang menampilkan dirinya sendiri kepada kita sebagai manusia. Tujuannya adalah agar kembali ke bendanya sendiri sebagaimana mereka tampil kepada kita dan menyampingkan atau mengurung apa yang telah kita ketahui tentang mereka. Dengan kata lain, fenomenologi tertarik pada dunia seperti yang dialami manusia dengan konteks khusus, pada waktu khusus lebih dari pernyataan abstrak tentang kealamiahan dunia secara umum. 17

#### 3. Pendekatan Fenomenologi Edmund Husserl

Husserl adalah pendiri dan tokoh utama dan aliran filsafat fenomenologi. Seperti telah disebutkan sebelumnya dalam sejarah fenomenologi, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Franz Brentano, terutama pemikirannya tentang "kesengajaan". Bagi Husserl fenomenologi adalah ilmu yang fundamental dalam berfilsafat. Fenomenologi adalah ilmu tentang hakikat dan bersifat apriori. Dengan demikian, makna fenomena menurut Husserl berbeda dengan makna fenomena menurut Immanuel Kant. Jika Kant mengatakan bahwa subjek hanya

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Zikri Fachrul Nurhadi, *Teori-Teori Komunikasi, Teori Komunikasi dalam perspektif Penelitian* Kualitatif, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 36.

mengenal fenomena bukan noumena, maka bagi Husserl fenomena mencakup noumena (pengembangan dan pemikiran Kant).<sup>18</sup>

Bila dibandingkan dengan konsep kesadaran dari Descartes yang bersifat tertutup, kesadaran menurut Husserl lebih bersifat terbuka. Husserl juga menolak pandangan Hegel mengenai relativisme fenomena budaya dari sejarah. Namun dia menerima konsep formal fenomenologi Hegel, serta menjadikannya sebagai dasar perkembangan semua tipe fenomenologi. Fenomena pengalaman adalah apa yang dihasilkan oleh kegiatan dan susunan kesadaran manusia. Dalam *Logical investigations*, Husserl menggarisbawahi sebuah sistem yang kompleks dari filsafat. Sistem tersebut bergerak dari logika ke filsafat bahasa baru kemudian ke ranah ontologi. Pembahasannya tidak berhenti sampai di sini, dari ontologi bergerak ke "kesengajaan" dan berakhir di fenomenologi pengetahuan. Barulah di *Ideas 1*, Husserl mengkhususkan pembahasannya pada fenomenologi, yang mendefinisikannya sebagai ilmu mengenai pokok-pokok *kesadaran (the science of the essence of consciousness).* 19

Selain mengemukakan definisi fenomenologi, Husserl banyak membahas mengenai ciri-ciri kesadaran dari orang pertama. Sampai saat ini, kita dapat mengartikan fenomenologi sebagai studi tentang kesadaran dari beragam pengalaman yang ada di dalamnya. Menurut Husserl, dengan fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, seolah-olah kita mengalaminya sendiri.

<sup>18</sup>Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, *Fenomenologi:Konsepsi*, *Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 9.

<sup>19</sup>Ibid.

Fenomenologi tidak saja mengklasifikasikan setiap tindakan sadar yang dilakukan, namun juga meliputi prediksi terhadap tindakan di masa yang akan datang, dilihat dari aspek-aspek yang terkait dengannya. Semuanya itu bersumber dari bagaimana seseorang memaknai objek dalam pengalamannya. Oleh karena itu tidak salah apabila fenomenologi juga diartikan sebagai studi tentang makna, di mana makna itu lebih luas dari hanya sekedar bahasa yang mewakilinya. Dalam *Ideas I*, Husserl merepresentasikan fenomenologi sebagai belokan transedental. Ia menentang metode "*Transcendental Idealism*" dan Kant, untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dari kondisi "kesadaran dan pengetahuan", selain juga untuk mencari realitas di balik fenomena. Pencarian ini mengantarkannya pada metode *epoché* (dalam bahasa Yunani yang berarti menjauh dan percaya).<sup>20</sup>

Husserl berpendapat bahwa ilmu positif memerlukan pendamping pendekatan filsafat fenomenologis. Pemahamannya diawali dengan ajakan kembali pada sumber atau realitas yang sesungguhnya. Untuk itu perlu langkahlangkah metodis "reduksi" untuk menempatkan fenomena dalam keranjang (bracketing) atau tanda kurung. Melalui reduksi, terjadi penundaan upaya menyimpulkan sesuatu dari setiap prasangka terhadap realitas. Adapun langkah Iangkah metodis yang dimaksud adalah Reduksi Eidetis, Reduksi Fenomenologi, dan Reduksi Transedental. Dengan menempatkan fenomena dalam tanda kurung, berarti kita menempatkan perhatian kita dalam struktur pengalaman sadar. Kata kuncinya adalah membedakan apakah kesadaran itu bagian dari kesengajaan, ataukah karena terhubung langsung dengan sesuatu. Misalnya kesadaran kita akan

<sup>20</sup>Ibid, 11.

sebatang pohon, dengan menempatkan pohon dalam tanda kurung, maka perhatian kita tidak harus kepada pohon secara fisik, namun bisa pada pohon dari makna pohon yang ada dalam struktur pengalaman kita. Inilah yang oleh Husserl dinamakan dengan pengertian *Noema* dan *Noematic* dari pengalaman.

Melalui reduksi transedental, Husserl menemukan adanya esensi kesadaran yang disebut intensionalitas. Setiap aktivitas intensionalitas (neotic) termasuk aktivitas menyadari sesuatu. Pengertian kesadaran selalu dihubungkan dengan kutub objektifnya, yakni objek yang disadari. Yang paling penting dalam reduksi ini, bukan terletak pada persoalan menempatkan penampakan fenomena dalam tanda kurung, melainkan pada bagaimana subjek memberikan interpretasi terhadap objek selanjutnya. Pengamatan Husserl mengenai struktur intensionalitas kesadaran, merumuskan adanya empat aktivitas yang inheren dalam kesadaran, yaitu: objektifikasi, identifikasi, korelasi, dan konstitusi.<sup>21</sup>

Penyelidikan Husserl selanjutnya berhasil menemukan adanya dunia yang dihayati. Adapun struktur-strukturnya hanya dapat diamati dengan cara melepaskan diri dari prasangka-prasangka teoritis yang berasal dan latar belakang keilmuan yang telah dimiliki sebelumnya. Setiap subjek transendental mengkonstitusikan dunianya sendiri, menurut perspektifnya sendiri yang unik dan khas. Dunia tidak dipahami sebagai dunia objektif dalam pengertian fisik material, tetapi dunia sebagaimana dihayati oleh subjek sebagai pribadi. Dengan demikian dalam pandangan fenomenologi, dunia itu subjektif dan relatif. Tugas

<sup>21</sup>*Ibid*, 14.

fenomenologilah untuk menggali dunia yang dihayati tersebut, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai asumsi ilmu pengetahuan.<sup>22</sup>

Fenomenologi Husserl pada prinsipnya bercorak idealistik, karena menyerukan untuk kembali kepada sumber asli pada diri subjek dan kesadaran. Ilmu komunikasi (komunikologi) akan mendapatkan landasan yang kokoh jika asumsi-asumsi ontologi dan epistemologinya didasarkan pada pengetahuan tentang esensi kesadaran. Konsepsi Husserl tentang "aku transedental" dipaharni sebagai subjek absolut, yang seluruh aktivitasnya adalah menciptakan dunia. Namun Husserl tidak menjelaskan bahwa dalam kehidupan yang sesungguhnya, subjek atau kesadaran itu selain mengkonstitusikan dunia, juga dikonstruksikan oleh dunia.<sup>23</sup>

# 4. Tahapan-Tahapan Fenomenologi Edmund Husserl

Pertama, epoche. Husserl menggunakan istilah ini untuk term bebas dari prasangka. Dengan epoche kita menyampingkan penilaian, bias, dan pertimbangan awal yang kita miliki terhadap suatu objek. Dengan kata lain, epoche adalah pemutusan hubungan dengan pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki sebelumnya. Oleh karena epoche memberikan cara pandang yang sama sekali baru terhadap objek, maka dengan epoche kita dapat menciptakan ide, perasaan, kesadaraan, dan pemahaman yang baru.

Kedua, Reduksi akan membawa kita kembali pada bagaimana kita mengalami sesuatu. Memunculkan kembali asumsi awal dan mengembalikan sifat-sifat alamiahnya. Reduksi fenomenologi tidak hanya sebagai cara untuk

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>N. Drijarkara, *Percikan Filsafat*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1989), 42.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Ibid.

melihat, numun juga cara untuk mendengar suatu fenomena dengan kesadaran dan hati-hati. Singkatnya, reduksi adalah cara untuk melihat dan mendengar fenomena dalam tekstur dan makna aslinya. Maka tugas dari reduksi fenomenologi adalah menjelaskan dalam susunan bahasa bagaimana objek itu terlihat.

Ketiga, variasi imajinasi. Tugas dari variasi imajinasi adalah mencari makna-makna yang mungkin dengan memanfaatkan imajinasi, kerangka rujukan, pemisahan dan pembalikan, serta pendekatan terhadap fenomena dari perspektif, posisi, peranan, dan fungsi yang berbeda. Tujuannya tiada lain untuk mencapai deskripsi struktural dari sebuah pengalaman. Target dari fase ini adalah makna dan bergantung dari intuisi sebagai jalan untuk mengintegrasikan struktur ke dalam esensi fenomena. Keempat, Sintetis makna dan esensi merupakan tahap terakhir dalam penelitian fenomenologi. Fase ini adalah integrasi intuitif dasardasar deskripsi tekstural dan struktural ke dalam satu pernyataan yang menggambarkan hakikat fenomena secara keseluruhan. Husserl mendefinisikan esensi sebagai sesuatu yang umum dan berlaku universal, kondisi atau kualitas menjadi sesuatu tersebut. Esensi tidak pernah terungkap secara sempurna. Sintesis struktur tekstural yang fundamental akan mewakili esensi ini dalam waktu dan tempat tertentu, dan sudut pandang imajinatif dan studi reflektif seseorang terhadap fenomena.<sup>24</sup>

<sup>24</sup>*Ibid*, 36-37.

## B. Kajian Politik: Komodifikasi Agama Dalam Politik

# 1. Pengertian komodifikasi Agama

Istilah komodifikasi secara etimologi diambil dari bahasa Inggris, yaitu commodification yang berasal dari akar kata commodity yang artinya adalah something produced for sale. Sariyatna dalam karya ilmiahnya berpendapat bahwa komodifikasi berasal dari kata "komoditi" yang berarti barang atau jasa yang bernilai ekonomi dan mengalami perubahan fungsi atau bentuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa komodifikasi adalah perubahan nilai maupun fungsi dari suatu barang maupun jasa menjadi komoditi (barang yang bernilai ekonomi). Komodifikasi didefinisikan sebagai proses transformasi menggunakan nilai-nilai hidup yang digunakan manusia menjadi sebuah nilai yang bisa ditukarkan. Sariyatna dalah perubahan nilai yang bisa ditukarkan.

Sedangkan menurut Muhammad Fakhruroji komodifikasi agama adalah transformasi nilai-nilai agama yang pada mulanya sebagai pedoman hidup dan sumber nilai-nilai normatif yang berlandaskan pada keyakinan ketuhanan menjadi nilai tukar dengan menggunakan fungsi-fungsinya yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Sementara itu, Fealy juga menjelaskan istilah komodifikasi Islam dimaknai sebagai bentuk komersialisasi Islam di mana keimanan beserta simbol-simbolnya dapat ditransaksikan untuk mendapat sebuah keuntungan.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Webster's New Word Encyclopedia, (1992), 226.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Sariyatna, dkk, Pengaruh Komodifikasi Budaya Terhadap Tingkah Laku Masyarakat Bali dalam <a href="http://fkipunmas.blogspot.com/2012/12/pengaruh-komodifikasi-budaya-terhadap.html">http://fkipunmas.blogspot.com/2012/12/pengaruh-komodifikasi-budaya-terhadap.html</a>. Dakses 26/10/2021.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Mohammad Fakhruroji, *Privatisasi Agama: Globalisasi dan Komodifikasi Agama*, (Bandung: UIN SGD Bandung, 2005), 206.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Hari Triwibowo, Wacana Pengantar Jual Beli Identitas Islam dalam http://htriwibowo.wordpress.com/2012/12/21/opini-masyarakat-simbolis. Diakses 27/10/2021

Mengacu pada uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa komodifikasi agama adalah suatu diskursus mengenai pertukaran kepentingan. Di mana agama dan simbol-simbol yang melekat padanya dapat dijadikan suatu komoditas yang dapat dipertukarkan guna memperoleh keuntungan bagi para pelakunya.

# 2. Nilai-Nilai Agama

Menurut Alo Liliweri, nilai adalah sebuah kepercayaan yang didasarkan pada kode etik di dalam masayarakat. Nilai menunjukan kepada kita tentang apa yang benar dan apa yang salah, baik dan buruk, ia juga menunjukan tentang bagaimana seharusnya kita hidup sekarang dan yang akan datang. Sedangkan istilah agama menurut kamus besar bahasa Indonesia, merupakan ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.

Secara bahasa, agama mengandung pengertian menguasai, ketaatan, serta balasan. Sedangkan secara terminologi agama diartikan sebagai sekumpulan keyakinan, norma, hukum dan tata cara hidup manusia dengan Tuhan dan sesamanya yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>31</sup>

Berdasarkan pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai agama Islam merupakan konsep abstrak dari diri manusia yang dianggap penting mengenai kode etik dalam kehidupan tentang apa yang dirasa benar atau salah, baik atau buruk, dan didasarkan pada sistem atau prinsip kepercayaan terhadap

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Alo Liliweri, *Makna Budaya Komunikasi Antar Budaya*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 108.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Wahyudin, Dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Grasindo, 2009), 12.

Tuhan Allah SWT. Nilai agama bersifat individual dan merupakan milik pribadi setiap seseorang. Nurcholis Madjid mengatakan bahwa nilai-nilai agama hendaknya diwujudkan menjadi kemanusiaan yang aktif serta bisa menjiwai kegiatan-kegiatan praktis manusia. Maka hal ini akan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebab esensi kemanusiaan tidak terbatas pada pertumbuhan material semata, tetapi meliputi apa yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya pada setiap diri manusia dan kemerdekaannya.<sup>32</sup>

Menurut Sururin nilai-nilai dalam agama Islam terdapat tiga paradigma yang perlu dikembangkan, yakni akidah, akhlak dan syariah. 33 Hakikat suatu nilai dalam Islam adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia, alam, serta mendapatkan keridhoan dari Allah SWT, yang dapat dijabarkan dengan luas dalam konteks Islam. Penempatan posisi nilai yang tertinggi ini adalah Tuhan, juga dianut oleh kaum filosofis idealis tentang adanya hirarki nilai. Menurut kaum idealis ini, nilai spiritual lebih tinggi dari nilai material. Kaum idealis menempatkan nilai agama pada posisi yang tinggi, karena menurut mereka nilainilai ini akan membantu kita merealisasikan tujuan kita pada tataran yang lebih tinggi, penyatuan dengan tatanan spiritual. 34

# 3. Tipe-Tipe Komodifikasi Agama

Komodifikasi dapat diartikan sebagai proses transformasi barang dan jasa dari nilai gunanya menjadi sebuah komoditas yang berorientasi pada nilai tukar sesuai dengan keinginan masyarakat, maka dalam tahap transformasi ini pasti

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Nurcholis Majid, *Islam Kemodernan Dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2008), 227.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 181-182.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Muhamadayeli, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2005), 91.

selalu melibatkan media massa dan para pembaca. Jadi komodifikasi agama sebagai proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme, melalui penggunaan isuisu ideologi untuk mempengaruhi komunikasi sebagai suatu praktik sosial yang komersial.<sup>35</sup>

Adapun tipe-tipe komodifikasi agama secara umum, dalam dunia politik ada beberapa bagian, yaitu antara lain:<sup>36</sup>

#### a. Komodifikasi Isi

Komodifikasi Isi sabagai pusat kajian dan perhatian politik media dan komunikasi, merupakan proses perubahan pesan dari kumpulan informasi ke dalam sistem makna dari wujud barang yang dipasarkan. Jadi ketika isi komunikasi dijadikan sebagai komoditas maka politik akan cenderung memusatkan kajian pada konten media, terutama dari kepentingan dan pertumbuhan dalam nilai konten media.

# b. Komodifikasi Khalayak

Komodifikasi khalayak sebagai proses modifikasi peran pembaca untuk menaruh perhatian, secara khusus dalam upaya memahami praktik umum dengan cara menyajikan iklan, baik melalui majalah, surat kabar, website, radio atau media sosial lainnya. Proses terjadinya ini merupakan sebuah bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antar perusahaan media dan orang yang meminta untuk pengiklanan. Komodifikasi khalayak ini juga terdapat dua bagian:

<sup>35</sup>Faiqatun Wahidah, "Komodifikasi Agama Dalam Iklan Televisi (Studi Analisis Semiotik Pada Iklan Wardah)", *Jurnal dakwah dan komunikasi*, Vol. 3, No. 4, (2015), 27. <sup>36</sup>Ibid,

- 1) Komodifikasi instrinsik, yaitu proses yang dilakukan oleh media dalam pertukaran rating, hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui karakteristik khalayak, dan keinginan speisifik dari masing-masing orang. Karena rating sebagai satu-satunya tolok ukur dalam melihat keberhasilan sebuah program dalam industri, dan juga untuk menilai konteks atau produk yang disajikan oleh media, apakah layak atau tidak untuk dikomsumsi dan dipilih.
- 2) Komodifikasi Ekstrinsik, sebuah proses yang terjadi dan melibatkan institusi pendidikan, pemerintah, budaya, telekomunikasi dalam perluasannya. Disamping itu, komodifikasi ini merupakan transformasi dari ruang umum menjadi kepemilikan privat seperti yang diwujudkan lewat iklan-iklan komersial.
- 3). Komodifikasi buruh atau yang biasa dikenal dengan komodifikasi tenaga kerja, adalah sebuah proses untuk mengkaji proses komodifikasi isi dan khalayak media, maka dalam menghadapi ini para pekerja media menanggapi dengan menggalang orang-orang dari media berbeda untuk bergabung dalam serikat pekerja dan organisasi-orgnisasi pekerja lain yang diklaim dapat mempersentasikan segmen terbesar tenaga kerja. sehingga dengan demikian keahlian dan jam kerja para pekerja dijadikan komoditas dan dihargai dengan gaji. Maka dalam tindakan proses komodifikasi, tindakan modal untuk memisahkan konsepsi dari eksekusi, keterampilan dari kemampuan untuk melaksanakannya.

Dari beberapa tipe tersebut di atas dapat dipahami bahwa tipe-tipe komodifikasi agama secara umum adalah subjek prioritas, *public figure*, dan penggunaan *tagline* atau slogan yang tepat. Jadi komodifikasi agama merupakan tindakan sosial yang dilakukan oleh orang yang memiliki kepentingan untuk mempromosikan dirinya atau produk dengan memprioritaskan subjek dan objeknya serta figur dan taglinenya yang dapat memberikan efektifitas dan efisiensi.

# 4. Pengertian Islam dan Politik

Agama Islam merupakan agama yang diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW,<sup>37</sup> Islam adalah agama yang berasal dari Allah Tuhan pencipta dan pemelihara alam jagad raya ini. Allah mempunyai sifat suci lagi absolut, di mana kebenaran dan perintah-Nya tidak dapat ditolak oleh manusia. Norma-norma akhlak yang diajarkan Islam mempunyai pengaruh besar dalam membina umat manusia untuk berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>38</sup>

Istilah politik secara etimologi berasal dari bahasa yunani, yaitu "polis" yang memiliki arti kota dan Negara. Kata "polis" tersebut berkembang menjadi kata lain seperti "politis" yang berarti warga Negara dan "politikus" yang berarti kewarganegaraan. Dalam suatu sistem dan tatanan politik suatu Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan serta pegambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara

<sup>37</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 2010), 17.

38 Ibid. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>A.P. Cowie, Oxford Leanear's Dictionary, (Oxford: Oxford University Press, 1990), 190.

beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan yang telah dipilih. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat. Oleh karena itu politik juga menyangkut kegiatan dari berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan individu.<sup>40</sup>

Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik (political behavior) serta budaya politik (political culture) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Menurut Taufik Abdullah, sikap dan perilaku budaya politik yang memakai kata sifat Islam bermula dari suatu kepribadian moral dan doktrin terhadap keutuhan komunitas spiritual Islam. Senada dengan apa yang dikemukakan Din Syamsuddin, Azyumardi, pandangan antropolog Dale Eickelman dan ilmuwan politik James Piscatori yang menyimpulkan bahwa gambaran politik Islam di seluruh dunia dewasa ini adalah pertarungan terhadap penafsiran makna-makna Islam dan penguasaan lembaga-lembaga politik formal dan informal yang mendukung pemaknaan Islam tersebut. Pertarungan seperti ini melibatkan objektivikasi pengetahuan tentang Islam yang pada gilirannya memunculkan pluralisasi kekuasaan keagamaan. 42

#### 5. Relasi Antara Islam dan Politik

Islam dan politik mempunyai titik singgung yang cukup erat, bila keduanya dipahami sebagai sarana menata kebutuhan hidup manusia secara

<sup>40</sup>Andi Mappetahang Fatwa, *Demi Sebuah Rezim*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000),

<sup>41</sup>M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2021), 31.

<sup>42</sup>Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 12.

menyeluruh. Islam tidak hanya dijadikan suatu alat untuk mencapai sebuah kepercayaan dan pengaruh dari masyarakat semata. Politik juga tidak hanya dipahami sekadar sebagai sarana menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan. Politik yang hanya dipahami sebagai perjuangan kekuasaan hanya akan mengaburkan maknanya secara luas dan menutup kontribusi Islam terhadap politik secara umum. Sering dilupakan bahwa Islam dapat menjadi sumber inspirasi kultural dalan politik. Pemahaman terhadap politik secara luas akan memperjelas relasinya dengan Islam.<sup>43</sup>

Dalam konteks Indonesia, relasi Islam dan politik juga menjadi jelas dalam penerimaan pancasila sebagai satu-satunya asas dan ideologi. Ini tidak berarti menghapus cita-cita Islam dan melenyapkan unsur-unsur Islam dalam percaturan politik di tanah air. Sejauh mana unsur Islam mampu memberikan inspirasi dalam kancah politik, tergantung pada kalangan tokoh-tokoh muslim yang mampu tampil dengan gaya baru yang dapat mengembangkan kekayaan pengetahuan sosial dan politik memetakan dan menganalisis transformasi sosial.<sup>44</sup>

Islam melihat politik sebagai satu cara penjagaan urusan umat (ri'ayah syu-aq al-ummah). Islam dan politik tidak boleh dipisahkan, kerana Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat Islam. Begitu pula politik tanpa Islam, hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan, jabatan, dan duniawi saja, kosong dari aspek moral dan spiritual. Oleh kerana itu,

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 32.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>*Ibid*, 33.

politik dalam Islam sangat penting untuk mengingatkan kemerdekaan dan kebebasan melaksanakan syariat Islam.<sup>45</sup>

Ada dua hal yang bersifat kontradiktif dalam konteks hubungan politik antara Islam dan negara di negara-negara Muslim atau negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia. Kedua hal tersebut yakni; Pertama, posisi Islam yang menonjol karena kedududukannya sebagai agama yang dianut sebagian besar penduduk negara setempat. Kedua, sekalipun dominan Islam seringkali termarginalkan dalam wilayah kehidupan politik di Negara yang bersangkutan. Sebagai agama yang dominan dalam masyarakat Indonesia, Islam telah menjadi unsur yang paling berpengaruh dalam budaya Indonesia dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam politik Indonesia. Namun demikian Islam hanya berperan marjinal dalam wilayah kehidupan politik nasional. Hal ini antara lain disebabkan karena "politik Islam" dan "non politik Islam" di kalangan umat Islam Indonesia yang telah berlangsung lama. 46

Nuansa dinamika politik dalam Islam telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, menurut keyakinan mayoritas muslim menerapkan model masyarakat Islam ideal era Nabi SAW bukanlah utopia, sebab model itu pernah terbukti dalam sejarah. Jika pada periode Mekah kaum muslimin masih menempati posisi marginal dan senantiasa tertindas, maka pada periode Madinah mereka telah mengalami perubahan yang sangat dramatis: umat Islam menguasai pemerintahan dan bahkan merupakan *a self governing community*. Di

<sup>45</sup>Zaki ulya, "Perbandingan Pemilihan Kepala Negara di Indonesia (Suatu Kajian Hukum Positif Indonesia dan Fiqih Siyasah)", *jurnal al-qadha*, Vol. 2, No. 2, (2015), 27.

<sup>46</sup>M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2021), 51.

Madinah peran Nabi Muhammad SAW selain sebagai agamawan beliau juga sebagai negarawan. Sejak saat itu oleh pakar politik modern, Islam dipandang sebagai suatu sistem pemerintahan politik dan sekaligus agama.<sup>47</sup>

# 6. Penggunaan Simbolisasi Islam di Ruang Publik

Dalam kehidupan sehari-hari, dapat ditemui adanya beberapa simbol-simbol agama berupa gambar, cerita, suara, dan teks yang memuat berbabagai konten tentang keagamaan. Karena dalam agama kehadiran simbol memiliki arti yang sangat esensial, bahkan bisa dikatakan bahwa simbol merupakan sebuah ciri khas agama.<sup>48</sup>

Agama membutuhkan simbol untuk menunjukkan keberadaannya atau eksistensinya yang religius sehingga mempu dan nampak kepada orang awam. Seperti halnya salib, ka'bah, dan lainnya. Simbol-simbol ini menghasilkan imagologi atau menampakkan agama tertentu sebagai religi yang fundamental. Adapun penggunaan simbolisasi agama di ruang publik ini sering terjadi dalam relasi iklan politik, karena dengan adanya simbol-simbol yang digunakan oleh para politisi memiliki orientasi untuk mendapatkan simpati masyarakat. Karena simbol merupakan tanda yang memberikan gambaran mengenai identitas tentang agama tersebut.<sup>49</sup>

Pada iklan-iklan politik yang sering dinampakkan simbol agamanya adalah mulai dari kalimat tagline atau selogan, penggunaan selogan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap orang untuk menciptakan dan menggiring masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Rahmat Effendi, *Kekuasaan Negara dalam Perspektif Dakwah Islam*, (Bandung: LPPM Unisba, 2003), 87.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Bambang Sugiharto, *Wajah Baru Etika dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 131.

untuk dapat menarik simpati masyarakat, seperti halnya selogan Bismillah melayani, Barokah, Amanah, dan lainnya. Hal ini merupakan upaya untuk menyadarkan dan memberikan informasi bahwa meraka betul-betul figur yang memperhatikan terhadap ajaran-ajaran agama.

Disamping itu juga dengan atribut (fisik dan non fisik) seperti halnya penggunaan foto yang terdapat dibeberapa sudut dengan kostum islami, ditampilkan dengan berbagai aksesoris yang selama ini melekat pada seorang muslim sejati. Konstruksi elemen tanda yang digunakan oleh seseorang merupakan tampilan yang memberi kesan bahwa dalam diri mereka akan selalu menghidupkan nilai-nilai keagamaan. Jadi dapat dipahami bahwa simbol agama sebagai elemen untuk membangkitkan semangat religius dan gairah masyarakat dalam memperjuangkan sosok figur yang Islami. Simbol agama yang dikemas oleh para figur menjadi fakta dan realitas yang tidak terbantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya simbol-simbol agama dalam iklan tersebut menggiring masyarakat untuk menuju pada pendangkalan simbol-simbol agama itu sendiri.

#### **BAB III**

#### GAMBARAN UMUM PILKADA SUMENEP TAHUN 2020

# A. Deskripsi Lokasi Penelitian

### 1. Profil Sumenep

Sumenep merupakan salah satu nama Kabupaten yang terdapat di ujung timur pulau Madura. Penyebutan istilah Sumenep dalam bahasa Madura lebih populer dikenal dengan istilah "Songenep". Jumlah populasi penduduk Kabupaten Sumenep sebanyak 1.100.821 jiwa dengan luas wilayah 2.094,48 km2. Letak wilayah Kabupaten yang berada di ujung timur pulau Madura ini berada di titik koordinat 7° 1′ 27.3″ S, 113° 53′ 24.74″ E-7.02425, 113.890206. Secara etimologi, nama Sumenep diambil dari bahasa Kawi atau Jawa kuno. Nama tersebut merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata "sung" dan "eneb". Kata "sung" memiliki arti sebuah relung, cekungan atau lembah, sedangkan kata "eneb" memiliki arti endapan yang tenang.

Jadi nama Songenep bilamana diartikan berdasarkan gabungan dari dua kata di atas memiliki arti lembah atau cekungan yang tenang. Hal ini sebagaimana disinggung dalam kitab Pararaton bahwa penyebutan kata Songenep sebenarnya sudah populer sejak kerajaan Singasari di mana pada saat sang Prabu Kertanegara mendelegasikan Arya Wiraraja (seorang penasehat kerajaan dalam bidang politik

<sup>1</sup>Website kabupaten Sumenep dalam https://www.sumenepkab.go.id. Diakses 28/10/2021.

37

dan pemerintah pada zamannya) sebagai penguasa diwilayah Sumenep, Madura

Timur pada tahun 1269 M.<sup>2</sup>

yang terletak di ujung timur pulau madura ini juga memiliki semboyan

yang dikenal dengan istilah "sumekar". Semboyan ini merupakan akronim dari

dua suku kata "Sumenep" dan "Karaton". Dengan semboyan tersebut

mengisyaratkan bahwa Kabupaten Sumenep secara historis memiliki hubungan

yang cukup erat dengan sistem kerajaan. Hal ini wajar mengingat sejarah

Sumenep merupakan daerah yang terdapat banyak karaton dan juga sebagai pusat

pemerintahan sang Adipati waktu dulu.<sup>3</sup>

2. Letak Geografis Sumenep

Sumenep berada diujung timur pulau Madura dengan letak

geografis di antara 113° 32'- 116° 16' bujur timur dan 4° 55' - 7° 24' lintang

selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan: Selat Madura

Sebelah utara: Laut Jawa

Sebelah barat: Pamekasan

Sebelah timur: Laut Jawa dan Laut Flores

<sup>2</sup>Iskandar Zulkarnaen, Sejarah Sumenep, (Sumenep: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep, 2003), 17.

 $^{3}Ibid.$ 

Wilayah Kabupaten Sumenep terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Untuk wilayah kepulauan, Sumenep tergolong Kabupaten yang memiliki banyak pulau. Ada 126 pulau (sesuai dengan hasil sinkronisasi luas Kabupaten Sumenep tahun 2002) yang tersebar membentuk gugusan pulau-pulau, baik yang berpenghuni (48 pulau) maupun yang tidak berpenghuni (78 pulau). Pulau paling utara adalah pulau Karamian yang terletak di kecamatan Masalembu dengan jarak ±151 mil laut dari pelabuhan Kalianget, dan pulau yang paling timur adalah pulau Sakala dengan jarak ±165 mil laut dari pelabuhan Kalianget.

Secara administratif Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang berada dalam wilayah provinsi Jawa Timur. Sumenep terdiri dari 27 wilayah kecamatan, 328 desa, dan 4 kelurahan, dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 2,093.47 KM². Pusat pemerintahan Kabupaten berada di Kota Sumenep tepatnya di kecamatan kota Sumenep.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari hasil Sensus penduduk tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Sumenep adalah 1.142.012 jiwa, yang terdiri dari 595.896 jiwa lakilaki dan 546.416 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah 2.093,47 KM² yang didiami 1.142.012 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sumenep ialah sebanyak 598 jiwa/KM². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah kecamatan kota Sumenep, yakni 2.843 jiwa/KM²,

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Website kabupaten Sumenep dalam <a href="https://www.sumenepkab.go.id">https://www.sumenepkab.go.id</a>. Diakses 28/10/2021.

sedangkan kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya ialah kecamatan Batuan, yakni 446 jiwa/KM<sup>2</sup>.6

### 3. Agama dan Partai Politik di Sumenep

Beberapa keyakinan atau agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Sumenep cukup beragam. Menurut data sensus penduduk tahun 2018, warga masyarakat Kabupaten Sumenep mayoritas menganut agama Islam, dengan rincian penganut agaman Islam berjumlah 1.033.754 jiwa, agama Kristen berjumlah 685 jiwa, agama Katolik berjumlah 478 jiwa, agama Budha berjumlah 118 jiwa, Agama Hindu berjumlah 8 jiwa, dan Kong Hu Cu berjumlah 5 jiwa.

Sedangkan partai politik yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep ialah sebagai berikut; yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Rakyat (DEMOKRAT), Partai nasional demokrat (NASDEM), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Gelombang Rakyat (GELORA) dan Partai Bulan Bintang (PBB).8

<sup>6</sup>Ibid.

'Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Data KPU Kabupaten Sumenep, 07/12/2021.

### 4. Profil Pasangan Calon Bupati Sumenep 2020

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sumenep kini sudah selesai digelar. yang berada di ujung timur pulau madura ini merupakan satu dari 270 daerah di Indonesia yang menggelar Pilkada serentak pada 9 desember 2020 yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Pasangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah dan Fattah Jasin-Ali Fikri Warits merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berhelat pada Pilkada Sumenep tahun 2020 lalu.

Pasangan calon Achmad Fauzi-Dewi Khalifah mendapat dukungan dari lima partai politik. Yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Achmad Fauzi merupakan petahana, karena sebelum mencalonkan diri sebagai calon bupati beliau merupakan wakil bupati Kabupaten Sumenep. Sedangkan cawabup Dewi Khalifah merupakan ketua muslimat NU Kabupaten Sumenep yang juga sebenarnya merupakan ketua dewan pimpinan cabang (DPC) partai HANURA di Kabupaten Sumenep, akan tetapi rekomendasi dari pengurus partai HANURA pada momentum Pilkada lalu justru jatuh ke pasangan calon Fattah Jasin-Ali Fikri.

Pasangan calon Fattah Jasin-Ali Fikri diusung oleh enam partai politik, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, partai Nasional Demokrat (NASDEM), partai Hanura dan partai

<sup>9</sup>Data KPU Kabupaten Sumenep, 07/12/2021.

Golkar. Fattah Jasin merupakan pejabat aktif, yakni sebagai kepala bakorwil IV Pamekasan. Sedangkan Ali Fikri merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep sekaligus putra tokoh partai persatuan pembangunan (PPP) Kabupaten Sumenep Alm. KH. Warits Ilyas pada masanya.<sup>10</sup>

Fattah Jasin- Ali Fikri didukung oleh partai politik dengan jumlah wakil di parlemen sebannyak 30 kursi, yakni PKB 10 kursi, PPP 7 Kursi, NASDEM 3 kursi, dan HANURA 3 kursi. Sedangkan Fauzi-Eva didukung oleh partai dengan keterwakilan di parlemen sebanyak 20 kursi. Partai PDIP 5 kursi, GERINDRA 6 kursi, PAN 6 kursi, PKS 2 kursi, dan PBB 1 kursi. Dengan demikian secara kekuatan dari sisi jumlah keterwakilan di legislatif, Fattah Jasin-Ali Fikri lebih kuat dibanding Fauzi-Eva. Fattah Jasin-Ali Fikri unggul 10 kursi dibanding Fauzi-Eva.<sup>11</sup> Hanya saja yang perlu digaris bawahi, bahwa dalam sirkulasi politik di Madura, termasuk di Sumenep, kekuatan parpol di kursi parlemen bukanlah satu-satunya variable penentu. Ada hal lain yang tidak kalah penting dalam percaturan politik untuk memperebutkan kepercayaan publik, yaitu modal sosial keagamaan. Latar belakang pasangan calon yang memiliki hubungan kuat dengan struktur keagamaan, katakanlah tokoh-tokoh agama dan pesantren turut menjadi salah satu faktor penting yang juga menentukan arah politik di Kabupaten Sumenep. Dan menariknya, kedua kubu ini sama-sama diaktori oleh tokoh-tokoh pesantren. Ada nyai Eva sebagai representasi politik muslimat NU yang juga dari

<sup>10</sup>Ibid,

 $<sup>^{11}</sup>Ibid.$ 

pesantren Aqidah Usmuni Sumenep, kemudian ada Kiai Fikri yang berasal dari salah satu pondok pesantren berpengaruh di Kabupaten Sumenep, yakni Annuqayah. 12

"Sumenep Barokah" adalah visi-misi besar pasangan calon bupati dan wakil bupati, RB Fattah Jasin dan KH. Mohammad Ali Fikri A. Warits pada perhelatan Pilkada 2020 lalu. Visi Sumenep barokah adalah memakmurkan desa, dan meratakan pembangunan. Sedangkan misinya ada lima poin. Pertama, melakukan percepatan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur penunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kedua, meningkatkan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Ketiga, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dalam berbag<mark>ai bidang. Keempat, m</mark>ewujudkan masyarakat yang religius, dan yang kelima, menciptakan tata kelola pemerintahan yang Good Governance.<sup>13</sup>

Sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, Ach. Fauzi dan Dewi Khalifah mengambil tageline "Bismillah Melayani", jargon ini diusung atas dasar ikhtiar untuk fasilitasi kebutuhan dasar. Melalui Bismillah melayani, aspek religius dan pelayanan bersatu padu menjadi bingkai kekuatan Fauzi-Eva. Dalam hal ini, tidak hanya menjajikan kesejahteraan yang sudah lumrah diutarakan ratarata calon. Namun, ia lebih pada pelayanan yang memang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan rumah sakit dan transportasi yang memadai di

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Abd Aziz, Dua tokoh pesantren bertarung berebut dukungan massa di Pilkada Sumenep, dalam https://m.antaranews.com/berita/1698726/31/08 2020. diakses/28/10/2021

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Data KPU Kabupaten Sumenep, 07/12/2021.

wilayah kepulauan misalnya, kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan guru, termasuk guru-guru ngaji yang ada di pesantren dan masjid-masjid. Serta nasib para petani, Fauzi-Eva akan memastikan para petani akan mendapat pelayanan yang baik, utamanya dalam hal memperjuangkan harga hasil panen para petani. 14

# B. Deskripsi Subjek Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki langkah utama untuk mendapatkan data. Peneliti tentu juga melakukan pengumpulan data secara *natural setting* dan observasi langsung ke tempat yang akan hendak diteliti yaitu di Kabupaten Sumenep Jawa Timur untuk mengetahui secara langsung respon masyarakat terhadap dinamika politik pada Pilkada Sumenep tahun 2020.

Moleong mendefinisikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan suatu informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Selain itu, Spradley juga mendeskripsikan bahwa subjek penelitian adalah masyarakat setempat yang terlibat secara langsung dalam peristiwa yang diteliti dan mengetahui dengan detail tentang sesuatu yang dialaminya serta informan juga dapat menggunakan bahasa mereka untuk menggambarkan berbagai kejadian dan tindakan dengan tanpa analisis mengenai arti atau signifikansi dari kejadian dan tindakan tersebut. Sebagai informan, yang artinya artinya sebagai informan, yang artinya analisis mengenai arti atau signifikansi dari kejadian dan tindakan tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Moleong, metode penelitian kualitatif, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), 132.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Spradley, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, (Jakarta; Grasindo, 2007), 68

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data lisan dan sumber data tertulis. Data lisan diperoleh dari masyarakat Sumenep yang terlibat langsung dengan dinamika prosesi Pilkada Sumenep tahun 2020. Adapun data tertulis diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah dan *stakeholder* terkait yang bersangkutan dengan penelitian tersebut serta dokumentasi berupa gambar dan arsip-arsip lainnya. Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah perwakilan dari masyarakat yang terlibat langsung dan memahami secara komprehensif terhadap dinamika Pilkada Sumenep tahun 2020 serta dapat memberikan informasi secara obyektif.

Adapun narasumber yang menjadi subjek penelitian ini terdiri dari 10 orang yang terdiri dari 2 tokoh agama (tokoh NU dan Muhammadiyah), 2 tokoh politisi (politisi PKB dan PAN), 4 Tokoh masyarakat (guru ngaji, guru honorer, dan PNS) dan 2 masyarakat biasa (petani). Dari uraian subjek penelitian di atas, maka penulis meyakini bahwa *sample* informan tersebut dapat mewakili dan dianggap cukup untuk menjadi narasumber mengenai penelitian yang berjudul "Analisis Fenomenologi Edmund Husserl Terhadap Komodifikasi Agama di Ruang Publik; Studi Kasus Penggunaan Simbol-Simbol Islam Pada Pilkada Sumenep 2020".

# 1. Hasil Wawancara Mengenai Latar Belakang Terjadinya Komodifikasi Agama Pada Pilkada Sumenep 2020

Beberapa hasil wawancara penulis dengan masyarakat, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta politisi yang terlibat dalam Pilkada Sumenep 2020 adalah sebagai berikut:

Banyak cara pandang yang penulis dapat dari beberapa hasil wawancara dengan para narasumber berikut mengenai persepsi terhadap prosesi dan dinamika Pilkada Sumenep tahun 2020. Apa yang melatar belakangi komodifikasi agama di ruang publik pada Pilkada Sumenep tahun 2020?

Bapak KH. Imam Sutaji berpendapat bahwa:

"Dalam dinamika politik Sumenep kemarin memang tidak terlepas dari ketersinggungan agama. Ini peristiwa lazim yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Sumenep. Bahkan secara umum dapat kita lihat dalam perpolitikan nasional. Ada tiga faktor sebenarnya mengapa komodifikasi nilai-nilai Islam itu sendiri masih begitu dominan digunakan oleh setiap individu maupun kelompok tertentu dalam ajang konstelasi politik. Pertama, kultur dan budaya masyarakat Sumenep yang kental dengan nuansa keagamaan. Kedua, posisi agama yang cenderung memiliki pengaruh serta magnet tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, minimnya kreatifitas metode yang digunakan oleh parpol, kelompok maupun relawan dari tiap kandidat. Ketiga faktor tersebut itulah yang membuat agama seringkali terseret dalam panggung-panggung politik. Dan keempat, kurangnya sikap kritis dari masyarakat Sumenep terhadap polarisasi agama yang terjadi pada pilakada Sumenep 2020 lalu."

Sedangkan menurut bapak K. Muhammad adalah:

"Tragedi demikian sudah lama terjadi, karena secara kultur agama dan politik sulit dipisahkan dan bahkan memeliki kesinambungan tersendiri. Kadangkala kepentingan agama bisa diperoleh dengan jalur politik serta sebaliknya,

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Imam Sutaji (Ketua LDNU Kab. Sumenep), *Wawancara*, Berumbung 4 november 2021.

kepentingan politik bisa diraih dengan melalui jalur agama. Ini adalah dua sisi yang sebenarnya jika kita bisa bijak menyikapinya akan berdampak baik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, dan wabil khusus terhadap kehidupan masyarakat Sumenep khususnya. Tapi jika tidak, justru akan mendapat kesan tidak baik bagi keduanya, agama maupun pilitik. Keduanya hanya akan kehilangan nilai positifnya."<sup>18</sup>

Namun menurut Bapak H. Khazaini Adhim adalah:

"Politik pada dasarnya adalah alat dan jalan untuk mengabdi kepada lebih banyak masyarakat luas. Karena dengannya kita bisa masuk dalam sistem dan menjadi bagian dari pemangku kebijakan. Sehingga tidak aneh jika kemudian kontestasi politik berupa Pilkada menjadi sesuatu yang benar-benar diperjuangkan dan diperebutkan sedemikian rupa. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi juga jangan sampai tragedi di lapangan justru berbanding terbalik dengan apa yang dicita-citakan politik itu sendiri. Agar supaya persepsi publik terhadap politik tidak buruk. Jika misalnya di lapangan ada praktek *money* politik, ketidak endependennya aparat atau bahkan adanya hegemoni agama yang dipasarkan sedemikian rupa lalu mengenyampingkan nilai-nilai yang terkadung di dalamnya itu hanyalah oknum yang mungkin belum bisa memahami cita-cita dan tujuan politik itu sendiri."

Dan Bapak Jauhari menambahkan bahwa:

"Bagi masyarakat pedesaan agama memiliki kesakralan tersendiri. Adat dan budaya yang diwarisi oleh leluhur masih menjadi tradisi yang kita rawat sampai sekarang. Secara tidak langsung masyarakat pedesaan memiliki sensitifitas tersendiri jika sudah menyinggung nilai-nilai agama. Dari peristiwa itulah mungkin politik juga mengambil peran di dalamnya sebagai upaya meraih suara masyarakat muslim khususnya."<sup>20</sup>

Senada dengan Bapak Jauhari, ibu Fatma juga berpendapat bahwa:

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Muhammad (Guru Ngaji Masjid Al-Muttahedah), *Wawancara*, Masjid Al-Muttahedah 10 November 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Khazaini Adhim (Politisi Partai PAN), Wawancara, Bragung 25 November 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Jauhari (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Banlapah 21 November 2021.

"kesakralan agama di tengah-tengah masyarakat pedesaan tidak bisa terelakkan, ia memiliki sisi magis yang kadang tidak bisa dinalar oleh logika manusia."<sup>21</sup>

# 2. Hasil Wawancara Mengenai Bagaimana Komodifikasi Agama Yang

## Terjadi Pada Pilkada Sumenep 2020

Ambisi kekuasaan serta jabatan dalam level apapun merupakan sesuatu yang mulai menjadi kelaziman, ia dikendalikan oleh ego diri yang membutakan mata hati dan cenderung dapat menghalalkan segala cara sehingga bisa mengotori amanat suci politik itu sendiri.

Pada dasarnya setelah penulis mencoba mengamati situasi hubungan agama dan politik yang terjadi pada Pilkada di Sumenep tahun 2020, cenderung terjadi pertukaran kepentingan antara agama dan politik. Ini tidak terlepas dari filosofi egoisme yang merupakan salah satu mazhab etika (filsafat moral), di mana logika egoisme ini mengambil bentuk tindakan atau perbuatan yang paling baik adalah yang memberi hasil dan manfaat bagi diri sendiri untuk jangka waktu yang lama. Turunan dari filsafat egoisme tersebut akan melahirkan ideologi hedonisme religius bagi para elite politik yang bersangkutan.<sup>22</sup> Oleh sebab itu penulis mencoba mewawancarai para narasumber berkaitan dengan Bagaimana dan seperti apa komodifikasi agama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada Pilkada Sumenep tahun 2020?

Bapak Irwan Hayat menyampaikan sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Fatmawati (Petani/Masyarakat), Wawancara, Lengkong 18 November 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 112.

"Sebagai salah satu partai dengan basis umat Islam tentu salah satu pendekatan yang kami gunakan adalah nuansa keislaman. Dan saya pikir setiap partai mau itu berideologi religius maupun ideologi nasionalis tetap yang menjadi sasaran adalah umat islam, mengingat Kabupaten Sumenep didominasi oleh pemilih muslim itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor penting kemenangan pasangan Fauzi-Dewi Khalifah berkat kekuatan personel tokoh. Sebab dari sisi dukungan partai pasangan calon nomor urut 01 ini kalah dibanding pasangan calon nomor urut 2."<sup>23</sup>

Sedangkan Bapak Maswari memberikan jawaban sebagai berikut:

"Masyarakat pedesaan sangat takdhim terhadap para kiai dan ulama. Setiap persoalan dari yang paling kecil sampai paling besar para kiai dan ulama selalu menjadi tempat untuk konsultasi. Dari urusan restu, macam-macam doa munajat hingga soal pilihan politik. Sehingga tidak ayal kemudian jika para calon bupati Sumenep berebut untuk menggandeng tokoh-tokoh Islam sebagai kepanjangan tangan dalam hal meyakinkan masyarakat bahwa pemimpin yang akan ia pilih bisa amanah dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sendiri."<sup>24</sup>

Dan menurut Bapak KH. Ahmad Syarqawi adalah:

"Simbolisasi Islam pada Pilkada Sumenep 2020 digunakan dalam beberapa posisi dan bentuk. Pertama, dalam bentuk predikat. Misalnya keturunan Ulama, Gus, Lora dan sebagainya. Kedua, dalam bentuk ungkapan maupun pernyataan yang mengandung unsur islami. Misalnya, *Subhanallah, Alhamdulillah*, dan lain sebagainya. Ketiga, dalam bentuk atribut. Misalnya dengan menggunakan sorban, rajin memakai baju koko, peci dan lain sebagainya. Pada momentum Pilkada biasanya setiap calon mendesain pribadinya sebagai sosok yang agamis, ramah, merakyat serta tidak jarang tampil di tengah-tengah acara keagamaan yang diadakan oleh masyarakat setempat."<sup>25</sup>

Bapak Abdullah juga mengatakan bahwa:

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Irwan Hayat (Politisi Partai PKB), Wawancara, Nangger 13 November 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Maswari (Guru SDN 1 Tlontoraja), *Wawancara*, Prancak 2 Desember 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Ahmad Syarqawi (Tokoh Muhammadiyah Bragung), Wawancara, Bragung 29 Oktober 2021.

"Saya pikir memang tidak ada yang tidak menggunakan isu keagamaan dalam kontestasi Pilkada Sumenep tahun 2020 kemarin. Wacana-wacana keagamaan begitu terasa saat dimana setiap pasangan calon justru lebih mementingkan sosialiasi akan kedekatannya dengan para ulama, habaib, tokoh pesantren dan lain-lain dibandingkan sosialisasi program kerja maupun visi-misi yang akan hendak dijalankan dalam kepemimpinannya ke depan. Padahal saya justru ingin melihat bagaimana tiap pasangan calon adu gagasan dan kemampuan dalam memetakkan problematika yang ada di Kabupaten Sumenep yang tentu juga dengan menghadirkan beragam solusinya." 26

Dipertegas juga oleh pernyataan Ibu Hasanah bahwa:

"Memang yang saya lihat di baliho-baliho dan poster-poster yang beredar terpampang jelas para tokoh dan pemuka agama di belakangnya. Menurut saya ini menjadi simbol dan isyarat tersendiri bagaimana sosok elite agama punya peran sentral dalam memobilisasi dan mempengaruhi masyarakat."<sup>27</sup>

Hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber di atas mejadi salah satu rujukan serta bahan kajian tentang bagaimana potret Pilkada sumenep 2020 dalam bayang-bayang agama. Ini bukti nyata bahwa agama dan politik adalah dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki peran masing-masing yang secara garis besar tujuan utamanya adalah mengatur, memberi rasa nyaman, dan mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi ketika para elite politik dan agama ini justru yang dipikirkan hanyalah kekuasaan semata, maka agama hanya akan menjadi alat untuk menunjang kepentingan politik belaka. Keduanya akan kehilangan nilai dan tujuannya.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Abdullah (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Banlapah 23 Oktober 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Hasanah (Ketua Muslimat NU Bragung), Wawancara, Bragung 19 Oktober 2021.

#### **BAB IV**

# KOMODIFIKASI AGAMA DI RUANG PUBLIK PADA PILKADA SUMENEP 2020

# A. Bentuk Komodifikasi Agama Pada Pilkada Sumenep 2020 Dalam Tafsir Fenomenologi Edmund Husserl

Di Indonesia agama tidak hanya terkait dengan persoalan ideologi, akan tetapi juga menyangkut persoalan politik. Ini sekaligus menunjukkan bahwa agama bagi masyarakat Indonesia sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan, termasuk politik. Dalam satu dekade terakhir, khususnya pasca runtuhnya kekuasaan orde baru, masyarakat sangat antusias untuk terlibat atau sekadar mengikuti perdebatan mengenai politik Indonesia yang begitu dinamis dan terbuka. Kehadiran partai politik baru pasca orde baru melengkapi saluran politik masyarakat yang sebelumnya dikekang dan diintervensi oleh kekuatan penguasa. Era reformasi hadir dengan segala bentuk kebebasan termasuk berpolitik, siapa saja memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi termasuk mendirikan partai politik dengan berbagai dasar dan landasan ideologis. Partai politik mengusung ideologi masing-masing untuk mencapai tujuannya. Kekuasaan diraih dengan segala cara, bahkan agama dijadikan salah satu alat di tengah ketaatan masyarakat Indonesia terhadap agamanya. Maka muncullah kemudian

51

partai politik yang berbasis agama dan non agama, atau yang biasa dikenal dengan

partai religius dan nasionalis.1

Bicara politik, Sumenep menjadi salah satu daerah yang baru saja

melaksanakan Pilkada pada tahun 2020 lalu. Menjadi diskursus menarik untuk

dikaji karena sepanjang dekade baru kali ini partai yang memiliki simbol

nasionalis justru yang menjadi pemenang pada perhelatan Pilkada Sumenep tahun

2020. Ini bukan berarti politik identitas mulai meluntur akan tetapi justru

sebaliknya, wacana-wacana keagamaan tidak hanya dimainkan oleh para politisi

yang berasal dari partai religius. Kini politik identitas bisa diperankan oleh siapa

saja mengingat pengaruh dan daya tawarnya begitu signifikan. Sumenep 2020

lalu tidak lepas dari pergulatan tokoh-tokoh agama, secara khusus Islam. Para

tokoh ini tidak hanya menjadi sebagai tempat konsultasi melainkan juga ikut andil

dalam memberikan maklumat untuk menggiring massa bahkan secara terang-

terangan mendampingi setiap calon dalam mimbar-mimbar dan panggung-

panggung politik untuk berkampanye. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh

Bapak Maswari salah satu narasumber yang penulis coba simpulkan bahwa

masyarakat pedesaan di Sumenep begitu sangat takdhim dengan sosok ulama, itu

sebabnya opini para tokoh agama seringkali menjadi rujukan bagi masyarakat

pedesaan termasuk dalam hal pilihan politik.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Qodir Zuly, Gerakan Islam Non Mainstream dan Kebangkitan Islam Politik di Indonesia,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 211.

<sup>2</sup>Maswari (Guru SDN 1 Tlontoraja), *Wawancara*, Perancak 2 Desember 2021.

Sebagai metode penelitian, fenomelogi sering dikenal sebagai metode deskriptif kualitatif dengan paradigma konstruktivisme.<sup>3</sup> Sesuai dengan asumsi ontologis yang ada dalam paradigma konstruktivisme, peneliti menggunakan metode ini akan memperlakukan realitas komodifikasai agama pada Pilkada Sumenep tahun 2020 sebagai konstruksi sosial kebenaran. Realitas juga dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya relatif, yaitu sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai relevan oleh para aktor sosial. Secara epistemologi, ada interaksi antara peneliti dan subyek yang diteliti. Sementara itu dari sisi aksiologis, peneliti akan memperlakukan nilai, etika, dan pilihan moral sebagai bagian integral dari penelitian. Peneliti merupakan fasilitator yang menjembatani keragaman subyektivitas pelaku sosial dalam rangka merekonstruksi realitas sosial, dalam hal ini komodifikasi agama pada Pilkada Sumenep tahun 2020 lalu.

Menurut Edmund Husserl Fenomena adalah fakta yang disadari dan masuk ke dalam pemahaman manusia, sehingga suatu objek ada dalam relasi kesadaran. Untuk itu, maka penulis mengungkap fenomena dalam hal ini Pilkada Kabupaten Sumenep 2020 yang melibatkan beberapa narasumber untuk menggali suatu informasi mengenai fenomena Pilkada Sumenep tahun 2020 lalu. Dari hasil wawancara penulis dengan KH. Ahmad Syarqawi, salah satu narasumber pada lampiran bab sebelumnya dapat penulis simpulkan bahwa Islam, dan beberapa terminologi yang berkaitan erat dengannya dalam kampanye politik di Pilkada sumenep tahun 2020 digunakan dalam beberapa kondisi dan bentuk.

23

<sup>3</sup>Moustakas Clark, *Phenomenological Research Methods*, (California: Sage, 1987), 87.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya,* (Bandung, Widya Padjadjaran, 2009), 34-45.

#### 1. Predikat

Salah satu modifikasi agama yang digunakan oleh pasangan calon ialah dalam bentuk ungkapan kata. Misalnya, penggunaan kata Islam taat, muslim sejati, haji/hajjah, keturunan Kiai, Gus, Lora dan sebagainya merupakan pilihan yang sangat umum digunakan oleh kelompok atau pihak yang sarat dengan kepentingan politik. Dalam masa kampanye, setiap calon dengan tegas mendefinisikan diri sebagai sosok yang agamis, muslim taat, bergelar haji, keturunan ulama, dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat secara jelas dari penulisan nama yang terpampang di berbagai fasilitas kampanye yang digunakan oleh setiap pasangan calon bupati Kabupaten Sumenep 2020 lalu, seperti halnya baliho, poster, dan media lainnya termasuk di media massa. Islam kini digunakan dalam segala hal, termasuk sebagai pelumas untuk memuluskan hasrat politik dari setiap calon. Dengan mengesampingkan tujuan dan esensi dari nilai-nilai islam itu sendiri.<sup>5</sup>

#### 2. Slogan

Selanjutnya ialah dalam bentuk ungkapan slogan. Setiap calon mengklaim masih memiliki silsilah dan kedekatan dengan para ulama atau kiyai. Slogan yang digunakan selalu berkaitan dengan kapasitasnya sebagai keluarga santri, bukan kaum abangan. Selalu tampil dan mereproduksi diri sebagai sosok yang taat melalui berbagai ungkapannya. Dengan kefasihan melafalkan terminologi arab seperti *Insyaallah, Subhanallah*, dan sebagainya. Padahal dalam banyak

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ahmad Syarqawi (Tokoh Muhammadiyah Bragung), *Wawancara*, Bragung 29 Oktober 2021.

kesempatan setiap calon sangat jarang menggunakan istilah tersebut sebelumnya. Reproduksi kesalehan diri dilakukan melalui penggunaan terminologi arab yang sangat dekat dengan islam tentunya. Hal ini kemudian menjadi penilaian sendiri oleh setiap pemilih sebagai orang saleh yang taat dalam beragama. Intensitas mengunjungi tempat-tempat ibadah, shalat berjamaah misalnya, sangat intens dilakukan menjelang waktu pemilihan sehingga mampu membuka banyak mata orang mengenai komitmennya dalam beragama.<sup>6</sup>

#### 3. Simbol

Komodifikasi agama melalui simbol atau atribut. Metode ini yang paling lazim digunakan. Berbagai foto yang tersebar di banyak tempat tampil dengan kostum "islami" yang merupakan aksesoris Islam itu sendiri. Misalnya baju koko, peci, sorban dan busana-busana muslim lainnya. Aksesoris-aksesoris Islam yang melekat di badannya mampu menyihir setiap masyarakat bahwa mereka adalah pribadi muslim sejati yang layak untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di Kabupaten Sumenep. Dalam setiap acara keagamaan seperti tabligh akbar, istighasah, pertemuan/pengajian keagamaan lainnya tidak pernah absen. Demikian seterusnya, setiap aktivitas yang dilakukan selalu mengarah pada pembentukan identitas diri sebagai pribadi yang saleh dan pro Islam. Tidak hanya itu, setiap calon juga dengan rajin mengunjungi lembaga-lembaga pendidikan agama seperti

 $^6$ Ibid.

madrasah dan pesantren. Mereka bahkan "ringan tangan" dengan memberikan bantuan berupa dana untuk proses pembelajaran di lembaga yang dikunjunginya.<sup>7</sup>

Dari beberapa temuan dan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber di halaman sebelumnya berkenaan dengan dinamika pertarungan politik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumenep antara Achmad Fauzi-Dewi Khalifah dan Fattah Jasin-Ali Fikri yang secara khusus keduanya memiliki visi-misi serta selogan yang ditengarai cukup kental dengan sebuah penekanan terhadap narasi-narasi keislaman yang berbau religius, seperti halnya "Sumenep Barokah" dan "Bismillah Melayani". Ini adalah indikator penting yang secara tidak langsung sebenarnya menjadi bukti sekaligus pengingat bahwa nasih begitu maraknya komodifikasi nilai-nilai Islam pada panggung-panggung politik lokal, dalam hal ini Kabupaten Sumenep.

Sampai saat ini, kita dapat mengartikan fenomenologi sebagai studi mengenai kesadaran dari beragam pengalaman yang ada di dalamnya. Menurut Husserl, dengan fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk-bentuk suatu pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya langsung, seolah-olah kita mengalaminya sendiri.<sup>8</sup> Fenomena ini tidak hanya saja mengklasifikasikan setiap tindakan sadar yang dilakukan, namun juga meliputi prediksi terhadap tindakan sadar yang dilakukan, namun juga meliputi prediksi terhadap tindakan di masa yang akan datang, dilihat dari aspek-aspek yang terkait dengannya.

 $^{7}Ibid.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, (Bandung, Widya Padjadjaran, 2009), 17.

Semuanya bersumber dari bagaimana seseorang memaknai objek dalam pengalamannya.

# B. Latar Belakang Komodifikasi Agama Pada Pilkada Sumenep 2020 Dalam Tafsir Fenomenologi Edmund Husserl

Menurut Husserl, fenomena adalah realitas sendiri yang tampak, tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan subyek dengan realitas, karena realitas itu sendiri yang tampak bagi subyek. Maka dari itu untuk mengetahui sebuah realitas penulis perlu adanya suatu subyek yang dapat menjelaskan bagaimana realitas itu terjadi, dalam hal ini fenomena Pilkada Sumenep 2020. Salah satu pertanyaan yang paling mendasar jika menghubungkan antara Islam dan politik adalah mengapa wacana simbol-simbol keagaman seringkali digunakan dalam setiap momentum Pilkada di Sumenep? Ada beberapa hal yang dapat dijadikan rujukan mengenai hal ini. Dari hasil penelitian penulis ada beberapa hal yang melatar belakangi.

# 1. Kultur dan Budaya Masyarakat Sumenep

Realitas masyarakat Sumenep secara kultur dan budaya cukup kental dengan nuansa keislaman. <sup>10</sup> Ini ditandai oleh penduduk Sumenep yang mayoritas merupakan pemeluk agama islam. Sehingga kondisi ini mendorong para elite partai politik menggunakan isu agama sebagai salah satu metode untuk meraih dukungan masyarakat. Realitas jumlah tersebut memang memberikan peluang

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>*Ibid*, 34-45.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Imam Sutaji (Ketua LDNU Kab. Sumenep), *Wawancara*, Berumbung 4 november 2021.

tersendiri bagi partai Islam untuk meraih suara berdasarkan rasionalitas pilihan, yaitu kesamaan ideologi. Akan tetapi bukan berarti partai yag memiliki ideologi nasionalis merasa kehilangan kesempatan untuk mengorganisir pemilih kalangan muslim, justru kesadaran itu menjadikan setiap elite partai berlomba-lomba untuk sowan kepada para tokoh-tokoh Islam yang dianggap memiliki pengaruh tersendiri terhadap masyarakat muslim.

# 2. Signifikansi Peran Agama Terhadap Masyarakat Sumenep

Di Sumenep agama dianggap masih memiliki magnet tersendiri untuk menarik perhatian dan simpati. Hal ini misalnya dapat dilihat dari sensitivitas umat muslim di Sumenep ketika merespon isu penodaan terhadap Islam yang dilakukan oleh Basuki Cahaya Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok serta kasus ditahannya imam besar Habib Rizieq Shihab beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa isu agama begitu sangat sensitif di Sumenep. Ini menjadi bukti bagaimana Islam di Sumenep masih cukup memancing perhatian umat sehingga dalam konteks Pilkada Sumenep Islam menjadi daya tawar tersendiri untuk dipasarkan. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam memiliki posisi yang sangat sentral dan strategis dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Sumenep secara khusus.

 $^{11}Ibid.$ 

### 3. Minimnya Kreatifitas Elite dan Simpatisan

Kurang kreatifnya para elite parpol dan simpatisan dalam menentukan metode atau cara menarik simpati pemilih. 12 Agama Islam dalam hal ini dipaksa untuk digunakan sebagai alat kampanye dalam berbagai modelnya. Islam hanya dianggap sebagai alat dan cenderung mengabaikan kesakralan nilai-nilai Islam itu sendiri. Oleh karena itu, para elite parpol pun kemudian menggunakan Islam sesuai kehendak dan kepentingannya dengan menafikan fungsi Islam yang merupakan pedoman hidup manusia yang di dalamya memuat tentang ajaran luhur mengenai keselamatan. Akibatnya, nilai-nilai Islam kini tereduksi oleh kepentingan kelompok tertentu dalam mencapai hasrat politiknya. Sehingga masyarakat pun kemudian sulit menetukan antara ajaran Islam yang perlu ditegakkan dengan keinginan suatu kelompok tertentu yang menggunakan Islam sebagai alat politiknya dalam mewujudkan kepentingan yang dicita-citakannya.

# 4. Sikap Apatis Masyarakat Sumenep

Sikap kritis masyarakat muslim Sumenep yang mulai memudar.<sup>13</sup> Fenomena ini justru semakin dimanfaatkan oleh para elite dan pengasong agama untuk melegalkan cara apapun demi mewujudkan kepentingan kelompoknya. Bahkan tidak mempedulikan adanya perbuatan yang menyimpang dari normanorma agama ataupun peraturan yang telah ditetapkan. Pemberian uang politik (money politic) misalnya merupakan salah satu contoh pembodohan yang dilakukan. Hal ini diperparah oleh sikap masyarakat pemilih yang justru

 $<sup>^{12}</sup>Ibid.$ 

 $<sup>^{13}</sup>Ibid.$ 

mengabaikan dan bahkan justru menggunakan kondisi tersebut untuk meraih keuntungan. Apa yang diberikan dan ditawarkan oleh para elite politik diterima begitu saja meskipun dengan tanpa kita sadari akan memiliki konsekuensi tertentu di kemudian hari. Masyarakat begitu sangat mudah terhipnotis oleh tipu daya simbolisasi nilai-nilai Islam yang seringkali diyakinkan oleh para politisi bahwa apa yang ia tawarkan adalah murni atas nama kemakmuran dan kesejahteraan umat muslim di masa depan.

Selain menggunakan simbol-simbol agama sebagai alat meraih dukungan masyarakat, partai politik juga melibatkan tokoh-tokoh agama dalam merebut kekuasaan. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Abdullah dalam hasil wawancara di lampiran bab sebelumya, bahwa yang penulis pahami adalah tokoh-tokoh agama seperti ustaz dan kiai yang memiliki reputasi baik di tengahtengah masyarakat dijadikan 'tandem' atau partner dalam kampanye. <sup>14</sup> Keterlibatan mereka pun lebih didasarkan pada hubungan yang saling menguntungkan antara elite partai politik dan elite agama. Kehadiran dan keterlibatan elite agama dalam politik semestinya dapat dilihat sebagai upaya untuk melakukan transformasi politik, dari yang sekular ke agamis. Akan tetapi justru yang terjadi adalah para elite Agama hadir sebagai bentuk legitimasi terhadap pelibatan agama dan politik. Pada kondisi seperti ini, para elite agama justru tidak mewarnai politik dengan corak keislaman, tetapi sebaliknya justru membawa Islam pada ranah yang kurang sesuai dengan kodrat agama sebagai sesuatu yang sakral. Para elite agama seakan merestui perilaku-perilaku politik

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Abdullah (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Banlapah 23 Oktober 2021.

yang tidak sesuai dengan norma-norma agama itu sendiri. Misalnya semangat menghargai kepada kelompok kandidat lain tidak lagi dominan, justru kebencian dan saling serang antar kelompok satu dengan yang lain semakin mengental di tengah-tengah masyarakat Sumenep.

Sebagai penegak dan penjaga marwah Islam semestinya para pemuka agama hadir dan memberi contoh terhadap masyarakat Sumenep untuk samasama menjaga ajang kontestasi Pilkada Sumenep 2020 bisa berjalan dengan baik, aman, jujur dan adil. Sehingga bisa meminimalisir tindakan tercela seperti saling menyerang, menghujat, menfitnah dan mengucilkan antara partai politik, individu, kelompok, dan pendukung tiap pasangan calon. Bilamana simbolisasi Islam serta keterlibatan para pengasong agama terus menggurita dalam perpolitikan Sumenep maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana wajah demokrasi Sumenep ke depan.

Keterlibatan para elite agama dalam politik praktis memberi sinyal serta penjelasan betapa agama dan politik tidak bisa dipisahkan begitu saja. Ini terbukti sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Hasanah, bahwa para calon seringkali menggunakan figur elite-elite agama di belakangnya baik dalam mendampingi kampanye maupun yang terpajang di poster dan baliho-baliho. Padahal asumsi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat beragama adalah "politik itu kotor", karena di dalamnya tidak ada kekekalan kecuali kepentingan. Dalam artian saat ini boleh jadi seseorang menjadi kawan dan diwaktu yang lain akan mejadi

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Hasanah (Ketua Muslimat NU Bragung), Wawancara, Bragung 19 Oktober 2021.

lawan. Kawan dan lawan ditentukan oleh kepentingan apa yang akan diperoleh secara bersama-sama, ketika kepentingannya berbeda maka secara otomatis kawan akhirnya berubah menjadi lawan. Demikian seterusnya. Oleh karena itu banyak pihak yang menghindari politik praktis dengan alasan demikian. Namun di sisi lain juga ada elite agama yang memiliki pandangan berbeda. Untuk memperjuangkan agama dalam kekuasaan harus dengan menggunakan jalur politik. Atas dasar alasan ini, pilihan mereka untuk terjun dalam dunia politik praktik pun dianggap sesuatu yang lazim.

Meskipun elite merupakan kelompok minoritas, namun karena pengaruhnya yang cukup kuat menjadikan mereka memperoleh posisi yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat. Kemampuan elite biasanya tidak hanya didukung oleh kharisma, tetapi juga didukung oleh kemampuan finansial. Mereka memiliki kemampuan di segala lini, hal ini kemudian yang membentuk dirinya sebagai figur atau tokoh yang dianggap mampu memberi sesuatu yang lebih terhadap masyarakat. Sehingga para elite kemudian terus melakukan berbagai upaya untuk tetap mempertahankan legitimasi serta pengaruhnya dengan beragam cara termasuk rela mengeluarkan banyak dana dengan jumlah besar dalam setiap kesempatan.

# C. Komodifikasi Agama pada Pilkada Sumenep 2020 Dalam Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl

Dari uraian mengenai pemikiran Edmund Husserl di atas kita dapat menemukan pokok-pokok pikiran yang kemudian menjadi dasar-dasar bagi

pendekatan fenomenologi Edmund Husserl dalam disiplin ilmu Filsafat terhadap fenomena komodifikasi agama pada Pilkada Sumenep 2020.

# 1. Manusia, Simbol dan Kebudayaan

Husserl manusia memiliki kemampuan tertentu Menurut membuatnya berbeda kualitasnya dengan binatang. Kemampuan tersebut adalah kemampuannya untuk menggunakan simbol-simbol yang merupakan rangkaian dari tanda-tanda. Dengan kata lain, manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan simbol guna melakukan komunikasi atau untuk menyampaikan sebuah pesan. Simbol paling dasar dan penting bagi kehidupan manusia adalah bahasa. Dengan kata lain, eksistensi kesadaran manusia hanya dapat diketahui dengan menggunakan baha<mark>sa. Maka dari it</mark>u salah satu faktor fundamental dari tokoh-tokoh agama, elite partai politik, simpatisan maupun kelompok-kelompok tertentu yang terlibat aktif pada Pilkada Sumenep 2020 seringkali menggunakan simbol sebagai upaya mempengaruhi dan memberikan legitimasi terhadap masyarakat Sumenep. Menurut Husserl perangkat simbol kebudayaan juga memiliki tiga wujud, yakni berupa budaya material, budaya perilaku, dan budaya gagasan.<sup>16</sup>

Dalam fenomena Pilkada Sumenep 2020, budaya material adalah simbol yang bersifat fisik atau bendawi, seperti halnya pakaian koko, sorban dan peci. Budaya perilaku adalah simbol yang bersifat tindakan, seperti halnya safari pesantren dan tokoh-tokoh agama. Sedangkan budaya gagasan adalah simbol yang

<sup>16</sup>Heddy Shri AP. "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Husserl Terhadap Nilai-Nilai Agama", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 20, No. 2, (2012), 287-288.

bersifat ide ataupun frasa seperti halnya visi-misi yang tercakup dalam istilah "Sumenep Barokah", "Bismillah Melayani", dan lain sebagainya.

# 2. Nilai-nilai Agama: Individual dan Kolektif

Nilai-nilai agama mempunyai dua dimensi, yakni: dimensi kolektif dan individual.<sup>17</sup> Artinya, ada pandangan yang kebenarannya diterima secara kolektif, diyakini oleh sejumlah orang, sekelompok orang, ada pula yang hanya diikuti oleh satu orang saja. Pada awalnya agama ini bersifat individual apalagi jika ini mengenai hal-hal yang tidak empiris atau dunia gaib, tetapi melalui proses komunikasi, doktrinisasi pandangan-pandangan yang hanya diyakini oleh satu orang ini kemudian diterima oleh banyak orang atau suatu kelompok.<sup>18</sup>

Keterlibatan simbol-simbol keagamaan pada Pilkada Sumenep 2020 lalu dapat dipandang sebagai fenomena empiris yang menyasar kelompok-kelompok tertentu serta masyarakat Sumenep untuk memberi kesan bahwa ruang-ruang keagamaan tidak hanya sekadar persoalan individu dengan Tuhannya serta tidak hanya sebatas aktivitas keruhanian belaka. Ia juga merupakan dimensi kolektif yang harus senantiasa masuk dalam ruang-ruang aktivitas sosial, politik dan budaya. Oleh karena itu, komodifikasi agama secara khusus Islam pada Pilkada Sumenep mejadi poin penting bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk tetap senantiasa dirawat, karena seringkali terbukti mengantarkan pada hasil yang memuaskan.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>*Ibid*, 292.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>*Ibid*, 293.

Karena Suatu sistem kepercayaan mendasari kehadiran unsur-unsur budaya, maka berkenaan dengan wujud sistem kepercayaan ini lebih banyak *ideational culture* yang berupa pengetahuan, pandangan, pendapat dan karena itu pula bersifat abstrak. Agar dapat diketahui keberadaannya, maka *ideational culture* yang berupa sistem kepercayaan ini perlu diwujudkan secara empiris, yang dapat diketahui lewat pancaindra, yakni dalam bentuk perilaku dan hasil perilaku. Seperti halnya cara memperlakukan sesuatu atau alat-alat serta sarana untuk memperlakukan tersebut. 19

Agama pada dasarnya juga merupakan perangkat simbol-simbol. Nilainilai agama dapat menjadi objek pemaknaan siapa saja, sehingga ia dapat bermakna positif maupun negatif. Dari sudut pandang tertentu nilai-nilai keagamaan kemudian dapat didefinisikan sebagai perangkat simbol mengenai dunia empiris dan tidak empiris yang diyakini akan kebenaran eksistensial dan substansialnya serta menjadi sarana manusia dalam menghadapi lingkungan dari mempertahankan hidupnya.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Ibid.

 $<sup>^{20}</sup>Ibid.$ 

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Penggunaan agama dalam dinamika politik Sumenep tidak lepas dari realitas para pemilih yang masih menempatkan agama pada posisi puncak siklus kehidupan sosialnya. Mayoritas masyarakat Sumenep melihat agama sebagai suatu pusat atau rujukan utama yang memiliki tata nilai tidak tergantikan.

- 1. Beberapa bentuk komodifikasi agama yang terjadi pada Pilkada Sumenep ialah sebagai berikut. *Pertama*, dalam bentuk predikat. Misalnya keturunan Ulama, Gus, Lora dan sebagainya. *Kedua*, dalam bentuk slogan maupun pernyataan yang mengandung unsur islami. Seperti halnya *Subhanallah*, *Alhamdulillah*, santri bersama kiai, *Bismillah* melayani, Sumenep barokah dan lain sebagainya. *Ketiga*, dalam bentuk atribut. Misalnya dengan menggunakan sorban, rajin memakai baju koko, peci dan lain sebagainya. Pada momentum Pilkada biasanya setiap calon mendesain pribadinya sebagai sosok yang agamis, ramah, merakyat serta tidak jarang tampil di tengah-tengah acara keagamaan.
- 2. Komodifikasi agama pada Pilkada Sumenep 2020 dalam perspektif fenomenologi Edmun Husserl dapat dipandang sebagai suatu realitas yang normatif. *Pertama*, kesadaran manusia pada prinsipnya tidak akan pernah lepas dari korelasi simbol dan budayanya, maka dari itu untuk mempertahankan eksistensi dan keberlangsungannya dalam hal ini penguasaan terhadap politik praktis, ia harus mampu beradaptasi dengan dirinya sendiri sebagai simbol dan

realitas kultur masyarakat Sumenep itu sendiri. *Kedua*, menurut perspektif Edmund Husserl nilai-nilai agama dapat menjadi objek pemaknaan siapa saja, sehingga ia dapat bermakna positif maupun negatif. Agama bukanlah ruang hampa, ia juga merupakan dimensi kolektif yang harus senantiasa terlibat dalam ruang-ruang aktivitas sosial, politik dan budaya. Oleh karena itu, komodifikasi agama menjadi diskursus penting dalam kultur perpolitikan Sumenep 2020 lalu.

#### B. Saran

Tanpa kita sadari, politisasi agama sebenarnya secara tidak langsung mendegradasi nilai-nilai politik dan agama itu sendiri. Karena pada hakikatnya tujuan dari kedua variable tersebut adalah jalan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan berkeadilan. Maka dari itu perlunya kesadaran dari setiap individu maupun kelompok terutama terhadap para elite agama maupun politik untuk lebih bijaksana lagi dalam hal beragama dan berpolitik, kedepan tokoh-tokoh tersebut diharap bisa mengejewantahkan agama dan politik pada level yang lebih mengedepankan substansi dan prestasi. Maka dari itu perlunya kreativitas baru dari para elite dan simpatisan untuk menentukan metode politik yang lebih mengedepankan aspek kebermanfaatan bagi masyarakat banyak, dalam artian apa yang kita perjuangkan tidak hanya semata-mata untuk meraih kekuasaan belaka. Kita berharap ke depan dinamika politik Sumenep bisa bertransformasi menuju politik yang lebih konstruktif untuk menjawab isu-isu sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### **BUKU**

- Andi Mappetahang, Fatwa. *Demi Sebuah Rezim*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 32.
- Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Azra, Azyumardi. Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Clark, Moustakas. Phenomenological Research Methods, California: Sage, 1987.
- Drijarkara, N. Percikan Filsafat, Jakarta: PT Pembangunan, 1989.
- Effendi, Rahmat. *Kekuasaan Negara dalam Perspektif Dakwah Islam*. Bandung: LPPM Unisba, 2003.
- Evans, Malcolom. *Manual on the wearing of religious Symbols in Public Areas*. France Publising: Council of Europe, 2009.
- Fachrul Nurhadi, Zikri. *Teori-Teori Komunikasi, Teori Komunikasi Dalam Perspektif Penelitian Kualitatif,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Fakhruroji, Mohammad. *Privatisasi Agama: Globalisasi dan Komodifikasi Agama*. Bandung: UIN SGD Bandung, 2005.
- Hadi, Sutrisno. Metode Reseach, jilid I, II. Yogyakarta: Andi Offsed, 1994.
- Kuswarno, Engkus. *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi:Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Liliweri, Alo. *Makna Budaya Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Littlejohn, Stephen W. Karen A. Foss, *Teori Komunikasi Theories of Human Communication*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Mahfudh MA. Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Moleong, metode penelitian kualitatif, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.
- Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, Yogyakarta: Gramedia, 2001.
- Mubarok, Achmad. Psikologi Dakwah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

- Muhamadayel. Filsafat Pendidikan Islam. Yogyakarta: Aditya Media, 2005.
- Muhammadayel, A.P. Cowie. *Oxford Leanear's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press, 1990, 190.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Pujileksono, Sugeng. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015.
- Qodir, Zuly. Gerakan Islam Non Mainstream dan Kebangkitan Islam politik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Spradley, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, Jakarta; Grasindo, 2007.
- Sugiharto, Bambang. Wajah Baru Etika dan Agama. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Syamsuddin, M. Din. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2021
- Zulkarnaen, Iskandar. Sejarah Sumenep, Sumenep: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumenep, 2003.

### **JURNAL**

- Hasse J. "Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol 1, NO. 2, 2016.
- Malik, Abdul dan Ariyandi Batubara. "Komodifikasi Agama dalam Ruang Politik di Seberang Kota Jambi", *Jurnal kontekstualita*, Vol. 29, No. 2, 2014.
- Nindito, Stefanus. "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 2, No. 1, 2005.
- Rahman, Mujibur. "Visualisasi Agama di Ruang Publik; Komodifikasi, Reproduksi Simbol dan Maknanya", *Jurnal Humanistika*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Razaki, Abdur. "Komodifikasi Islam (Kesalehan dan Pergulatan Identitas di Ruang Publik)", *Jurnal Dakwah*, Vol. 14, No. 2, 2013.

- Shri AP, Heddy. "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Husserl Terhadap Nilai-Nilai Agama", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 20, No. 2, 2012.
- Ulya, Zaki. "Perbandingan Pemilihan Kepala Negara di Indonesia (Suatu Kajian Hukum Positif Indonesia dan Fiqih Siyasah)", *Jurnal Al-qadha*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Wahidah, Faiqatun. "Komodifikasi Agama Dalam Iklan Televisi (Studi Analisis Semiotik Pada Iklan Wardah)", *Jurnal dakwah dan komunikasi*, Vol. 3, No. 4, 2015.

#### **INTERNET**

- Aziz Abd, Dua tokoh pesantren bertarung berebut dukungan massa di Sumenep, dalam <a href="https://m.antaranews.com/berita/1698726/31/08/2020.">https://m.antaranews.com/berita/1698726/31/08/2020.</a> diakses/15/10/2021.
- Hari Triwibowo, Wacana Pengantar Jual Beli Identitas Islam dalam <a href="http://htriwibowo.wordpress.com/2012/12/21/opini-masyarakat-simbolis">http://htriwibowo.wordpress.com/2012/12/21/opini-masyarakat-simbolis</a>.

  Diakses 27/10/2021
- Sariyatna, dkk, Pengaruh Komodifikasi Budaya Terhadap Tingkah Laku Masyarakat Bali dalam <a href="http://fkipunmas.blogspot.com/2012/12/pengaruh-komodifikasi-budaya-terhadap.html">http://fkipunmas.blogspot.com/2012/12/pengaruh-komodifikasi-budaya-terhadap.html</a>. Dakses 26/10/2021.
- Website Kabupaten Sumenep dalam <a href="https://www.sumenepkab.go.id">https://www.sumenepkab.go.id</a>. Diakses 28/10/2021.

#### **WAWANCARA**

Abdullah. Wawancara pribadi. 23 Oktober 2021.

Adhim, Khazaini, Wawancara pribadsi. 25 November 2021.

Fatmawati. Wawancara pribadi. 18 November 2021.

Hasanah. Wawancara pribadi. 19 Oktober 2021.

Hayat, Irwan. Wawancara pribadi. 13 November 2021.

Jauhari. Wawancara pribadi. 21 November 2021.

Maswari. Wawancara pribadi. 2 Desember 2021.

Muhammad. Wawancara pribadi. 10 November 2021.

Sutaji, Imam. Wawancara pribadi. 4 November 2021.

Syarqawi, Ahmad. Wawancara pribadi. 29 Oktober 2021.